

## **MOTO**

Masa lalu yang buruk biarlah jadi kenangan dan jadikan cambuk untuk meraih masa depan yang lebih baik.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Untuk orang-orang yang aku sayangi kalian akan mengetahui peristiwa ini lebih dalam dan akan berguna buat anak dan cucu kita nanti.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah menyelesaikan skripsi berjudul Pemindahan Ibukota Republik Indonesia 1946-1949 sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana pada jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Ide untuk menulis tema tersebut saya dapatkan setelah melihat di perpustakaan kurangnya tulisan mengenai proses pemindahan ibukota termasuk sebab dan akibat dari proses tersebut.

Ucapan terimakasih saya untuk para dosen, yaitu Bapak Dr. Bambang Purwanto yang memberi masukan ide-ide mengenai tema skripsi yang sesuai dengan saya. Bapak Uji Nugroho Winardi, M.A selaku dosen pembimbing skripsi. Beliau banyak memberi masukan mengenai isi dari skripsi ini termasuk ide untuk banyak memasukan gambar dalam skripsi ini. Bapak Dr. Abdul Wahid selaku dosen pembimbing akademik sejak semester I. Serta para dosen lainnya yang sudah memberikan ilmunya selama saya kuliah di jurusan ini.

Terimakasih juga atas dukungan moril dari teman-teman Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2013. Dukungan kalian sungguh sangat membantu saya untuk menyelesaikan studi selama lima tahun ini.

Tak lupa juga ucapan terima kasih untuk ibu dan adik saya tercinta yang selalu mendoakan kelancaran skripsi saya. Untuk almarhum bapak, saya selalu ingat kata-katanya untuk menyelesaikan studi pilihan saya ini sampai tuntas. Dan sekarang janji itu sudah saya tepati. Saya tahu bahwa bapak selalu mendoakan saya dari surga.

Dan akhirnya saya berharap skripsi saya ini berguna bagi siapa pun yang membacanya dan membutuhkan data mengenai pemindahan ibukota.

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar1: Perundingan antara pemerintah Indonesia, Belanda dan Inggris .....	34
Gambar2: prajurit TRI bersiaga menyambut Jenderal Sudirman.....	40
Gambar 3: Orang-orang Indonesia yang kembali dari Belanda.....	46
Gambar 4: Konferensi Pertama TKR di Alun-alun utara.....	50
Gambar 5: Tulisan semboyan perjuangan di pagar Gedung Agung .....	52
Gambar 6 :Letkol Suharto bersama kawan –kawan seperjuangan.....	61
Gambar 7: Letkol Mokoginta melaporkan pemindahan pasukan .....	64
Gambar 8: Pertemuan Hamengku Buwono IX dengan H.Merle Cohran .....	67
Gambar 9 : Muhammad Hatta di Lapangan Terbang Maguwo.....	68
Gambar10: H. Merle Cohran dan Sri Sultan Hamengkubuwono .....	70
Gambar11: Pelantikan Anggota Parlemen RIS.....	75

## DAFTAR ISTILAH

AFNEI: *Allied Forces Netherlands East Indies* adalah pasukan Sekutu yang ditugaskan di Indonesia untuk membebaskan tawanan Jepang

API: Angkatan Pemuda Indonesia

BKR: Badan Keamanan Rakyat merupakan lembaga yang didirikan pada 22 Agustus 1945 dengan tujuan menjaga keamanan serta stabilitas negara pada awal kemerdekaan yang merupakan cikal bakal terbentuknya TNI

NICA: *Netherland Indies Civil Administration* /Pemerintah Sipil Hindia Belanda yang ingin merestorasi kolonialisme Belanda pasca pendudukan Jepang

UNCI: *United Nation Commision for Indonesia* /Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Indonesia yang merupakan misi PBB untuk menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda

TRM: Tentara Rakyat Mataram merupakan laskar yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mempertahankan kemerdekaan

Laskar: Tentara liar

IPPHOS: Indonesia Press Photo Service

TKR: Tentara Keamanan Rakyat

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Pemberitaan terpilihnya Sukarno sebagai Presiden RIS .....	83
Lampiran 2: Pemberitaan Upacara penyerahan kedaulatan .....	84
Lampiran 3: Pemberitaan penyambutan Sukarno di Jakarta .....	85

## ABSTRAKSI

Tulisan ini membahas mengenai pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta pada 1946, dan Yogyakarta ke Jakarta 1949. Ketertarikan penulisan skripsi ini karena belum ada yang menuliskan mengenai dua kali pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta dan dari Yogyakarta ke Jakarta. Tulisan ini akan membahas hal tersebut secara lebih mendalam lagi. Hal ini perlu dituliskan agar bisa mengetahui dan mendalami proses peristiwa tersebut yang terjadi dua kali dalam 3 tahun. Dalam tulisan ini akan dibahas penyebab ibukota berpindah dua kali, latar belakang peristiwa tersebut, proses pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta dan dari Yogyakarta ke Jakarta dan peran Yogyakarta selama menjadi ibukota republik. Sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer yang terdiri dari arsip tekstual dan Foto *IPPHOS* (*Indonesia Press Photo Service*) yang ditemukan di ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) serta koran di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan sumber sekunder yang terdiri dari buku-buku referensi terdiri dari beberapa buku diantaranya Suhartono. W. Pranoto, *Yogyakarta Ibukota Republik*, Robert Cribb, *Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta (1945-1949)*, Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, F.X. Sunarto, *Yogya Benteng Proklamasi* dan S. Margana dkk, *Gelora Di Tanah Raja Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-1949* dan Sudomo Sunaryo, *Wasiat HB IX Yogyakarta Ibukota Republik*.

Situasi Jakarta yang tidak aman pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disebabkan oleh para laskar dan pertempuran antara pihak Indonesia dan pihak NICA yang ingin menguasai kembali Indonesia dan adanya percobaan pembunuhan terhadap Sutan Syahrir menimbulkan pemikiran untuk memindahkan ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemindahan ini tidak lepas dari peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang mau menerima Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia yang dinilai lebih aman saat itu. Maka pada 4 Januari 1946 ibukota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. Pada 28 Desember 1949 ibukota dipindahkan kembali dari Yogyakarta ke Jakarta dan sejak saat itu bentuk negara Indonesia adalah serikat. Pada tanggal 17 Agustus 1950 bentuk negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan Jakarta menjadi ibukota Republik Indonesia.

### Kata Kunci:

Ibukota, Jakarta, Yogyakarta, Revolusi, Sukarno, Hamengku Buwono IX



## ABSTRACT

This writing discusses the relocation process the capital of Jakarta to Yogyakarta and Yogyakarta to Jakarta in the 1946-1949. My interest of writing this thesis because there were nobody wrote about the twice relocation process of the capital from Jakarta to Yogyakarta and from Yogyakarta to Jakarta. This thesis will discuss the issue more deeper. This must be written to know and explore the process of the incident that happen twice in three years. The thesis will be discussed the cause of the relocation capital twice, background of the incident , the relocation process of the capital from Jakarta to Yogyakarta and from Yogyakarta to Jakarta and the role of Yogyakarta during the capital of Republic of Indonesia. The source used in this thesis consisting of a source of primary consisting of textual archive and a photograph of IPPHOS (Indonesia Press a Photo Service) found in ANRI (National Archive of the Republic of Indonesia) and newspaper from the National Library of the Republic of Indonesia and secondary sources consisting of reference books consisting of some books including Suhartono. W. Pranoto , *Yogyakarta Ibukota Republik*, Robert Cribb, *Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta (1945-1949)*, Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, F.X ,Sunarto, *Yogya Benteng Proklamasi* dan S. Margana dkk, *Gelora Di Tanah Raja Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-`1949* dan Sudomo Sunaryo, *Wasiat HB IX Yogyakarta Ibukota Republik*.

The unsafe situation in Jakarta in the aftermath of the independence of Indonesia caused by the fighting of the troops and also between Indonesia and the NICA who want to control back Indonesia and the existence of the attempted murder of Sutan Syahrir gave the idea to relocate the capital of Indonesia from Jakarta to Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono IX had a big role in the relocation process. He would accept Yogyakarta as the capital of the republic of Indonesia that are considered to be more safe at that time. And in January 4<sup>th</sup>, 1946 the capital of Indonesia moved to Yogyakarta. On December 28<sup>th</sup>, 1949 the capital moved back from Yogyakarta to Jakarta and Indonesia form of state is united. On August 17<sup>th</sup>, 1950 the Indonesia form of state once again become the unitary state and Jakarta is the capital of the Republic of Indonesia.

### Key Word:

Capital City, Yogyakarta, Revolusi, Sukarno, Hamengku Buwono IX

## DAFTAR ISI

MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAKSI .....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH DAN RUANG LINGKUP .....	2
C. TUJUAN PENELITIAN .....	3
D. TINJAUAN PUSTAKA .....	4
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN .....	5
F. METODE PENELITIAN DAN SUMBER PENELITIAN .....	6
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	6
BAB II.....	8
SITUASI SEPUTAR PROKLAMASI .....	8
A. Menyerahnya Jepang Kepada Sekutu .....	8
B. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia .....	12
C. Kedatangan Tentara Sekutu .....	20
BAB III .....	26
A. Situasi Jakarta .....	26
B. Sukarno Memindahkan Ibukota dari Jakarta Ke Yogyakarta.....	31
C. Pidato Menteri Penerangan Mr Ali Sastromidjojo .....	37
D. Yogyakarta Sebagai Kota Pertahanan dan Pusat Pemerintahan.....	39
BAB IV .....	53
PEMINDAHAN IBUKOTA DARI YOGYAKARTA KE JAKARTA .....	53
A. Perundingan Indonesia-Belanda .....	53
B. Pemindahan Ibukota dan Pembentukan Negara Federasi Indonesia.....	61
BAB IV .....	66
Kesimpulan .....	66
Daftar Pustaka.....	68



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan berarti Indonesia benar-benar merdeka. Kekalahan Jepang terhadap sekutu menimbulkan permasalahan baru di Indonesia, kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia yang awalnya datang untuk melucuti senjata tentara Jepang ternyata diboncengi NICA. Pendaratan tentara Sekutu pada tanggal 15 September tahun 1945 di Tanjung Priok dipimpin oleh W.R Paterrson. Di Indonesia Sekutu membentuk AFNEI (*Allied Forces Nederlands East Indies*) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas AFNEI di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menerima penyerahan senjata dari tangan Jepang.
2. Membebaskan para tahanan perang.
3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan.
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai di Indonesia kepada pemerintah sipil Belanda.
5. Menghimpun keterangan tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang.

Kedatangan pasukan sekutu ini pada mulanya disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia. Namun setelah diketahui pihak Indonesia bahwa pasukan Sekutu datang memboncengi NICA dan ingin menegakan kembali kolonialisme Belanda, maka pihak Indonesia akhirnya berubah sikap yang pada awalnya netral menjadi bermusuhan kepada Sekutu.

Situasi dengan cepat berubah menjadi buruk setelah NICA mempersenjatai kembali orang-orang KNIL yang baru saja dibebaskan dari tahanan Jepang.<sup>1</sup> Kehadiran berbagai kelompok bersenjata baik yang berasal dari NICA, orang-orang yang dulu bekerja untuk KNIL, dan yang takalah penting adalah kemunculan berbagai kelompok laskar yang kebanyakan pernah dilatih Jepang, membuat aksi kerusuhan mudah pecah di Jakarta. Hal ini membuat situasi Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia menjadi tidak aman. Kekhawatiran Sukarno dan Sjahrir adalah akan terjadi konflik bersenjata dan percobaan pembunuhan di Jakarta. Oleh karena itu pemerintah Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibukota ke Yogyakarta.

## **B. RUMUSAN MASALAH DAN RUANG LINGKUP**

Dalam Waktu Tiga Tahun Ibukota telah berpindah dua kali, lantas bagaimanakah proses ini terjadi?

Sejak Proklamasi kemerdekaan, kondisi ibukota Jakarta dirasa sudah tidak aman untuk para petinggi negara Indonesia, hal ini salah satunya disebabkan oleh kedatangan tentara Sekutu yang diboncengi oleh NICA yang ingin menguasai kembali Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan. Oleh karena itu, Sukarno dan Hatta terpaksa mengungsi dan memindahkan ibukota ke Yogyakarta. Selama periode awal 1946-1949, Yogyakarta menjadi ibukota RI. Pemerintahan RI terpaksa dipindahkan ke Yogyakarta. Pada masa itu, Presiden Sukarno, para menteri dan para tokoh pimpinan nasional RI menaruh kepercayaan dan

---

<sup>1</sup> Robert Cribb, *Para jago Dan Kaum Revolusioer Jakarta 1945-1949*, (Jakarta: Masup Jakarta, 2010) hlm.26

pengharapan kepada Yogyakarta ketika Jakarta dirasa tidak lagi aman. Akhirnya, pada 4 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi ibukota Republik Indonesia. Sukarno dan Hatta dan para menteri hijrah secara diam-diam ke Yogyakarta. Namun, Perdana Menteri Sjahrir tetap tinggal di Jakarta.

Namun bukan berarti mereka merasa aman selama berada di Yogyakarta. Agresi Militer Belanda II yang menduduki Yogyakarta membuat Sukarno dan beberapa pejabat pemerintah ditangkap dan diasingkan ke pulau Bangka. Pada tahun 1949 Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Mohammad Hatta dan Ratu Yuliana terlibat dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag dan mengakhiri konflik Indonesia- Belanda. Pada tanggal 29 Desember 1949 ibukota Republik Indonesia pindah kembali ke Jakarta dan Indoneia kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.<sup>2</sup>

Dari rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan berikut ini: 1) Bagaimana situasi Jakarta pasca Proklamasi? 2) Mengapa Sukarno memilih Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia? 3) Apa peran Yogyakarta selama menjadi ibukota Republik Indonesia? 4) Bagaimana proses pemindahan ibukota dari Yogyakarta ke Jakarta?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan proses pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta dan menjelaskan kembalinya ibukota Republik dari Yogyakarta ke Jakarta. Menjelaskan situasi Jakarta sesudah Proklamasi Kemerdekaan, selain itu juga ingin melihat peristiwa-peristiwa penting selama

---

<sup>2</sup> Sudomo Sunaryo, *Wasiat HB IX*, (Yogyakarta: Galang Press, 2011) hlm.97-98

proses pemindahan melalui foto dan gambar dengan mendokumentasikan proses perpindahan tersebut.

#### D. TINJAUAN PUSTAKA

Tulisan mengenai pemindahan ibukota disebutkan dalam sebuah Skripsi berjudul *Adipati Paku Alam VIII: Kiprah Sang Negarawan Masa Revolusi 1946-1949 Di Yogyakarta*. Skripsi ini menyebutkan saat pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta dengan fokus pada peran Sri Paku Alam VIII.

Dalam buku R. Cribb, *Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta (1945-1949)* diceritakan tentang situasi Jakarta pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dipenuhi dengan laskar dan tindakan kejahatan seperti perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan dan kekerasan pada etnis tertentu yang menyebabkan Jakarta menjadi tidak aman.

Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, buku ini menceritakan Etnis Tionghoa di Jakarta pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dijelaskan dalam buku tersebut mengenai peran Etnis Tionghoa bahwa mereka juga berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman Sekutu yang memboncengi NICA untuk menguasai kembali Indonesia. Pertempuran yang melibatkan Etnis Tionghoa di Jakarta juga dibahas dalam buku ini dan juga para TKR yang ikut bertempur bersama Etnis Tionghoa.

W.P Suhartono, *Yogyakarta Ibukota Republik* menjelaskan mengenai situasi Yogyakarta saat menjadi ibukota republik dan peran Yogyakarta selama menjadi ibukota serta peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Yogyakarta seperti serangan umum 1 Maret yang menjadikan Jogja sebagai benteng pertahanan Republik dan peran tokoh-tokoh penting seperti Sukarno, Hatta dan

lain-lain saat ibukota Republik berada di Yogyakarta dan pegasingan tokoh-tokoh penting seperti Sukarno, Hatta dan kawan-kawan ke Bangka.

F.X, Sunarto, *Yogya Benteng Proklamasi*, dalam buku ini dijelaskan pembentukan BKR hingga menjadi TNI dan peran Yogyakarta dalam mempertahankan Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dijelaskan pula mengenai pembentukan BKR hingga menjadi TNI dan peran Yogyakarta selama menajadi ibukota Republik

S. Margana dkk, *Gelora Di Tanah Raja Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-`1949*, dalam buku tersebut dijelaskan mengapa Yogyakarta yang dipilih sebagai ibukota. Menurut Farabi Fakhri dalam buku tersebut dikatakan bahwa Yogyakarta adalah kota propaganda dan tempat berkumpulnya para pejuang dari berbagai daerah yang menjadi tentara pelajar di kota tersebut.

Sudomo Sunaryo, *Wasiat HB IX Yogyakarta Ibukota Republik*, dijelaskan mengenai saat Yogyakarta sebagai ibukota RI. Selama Yogyakarta menjadi ibukota republik, kota ini berperan penting sebagai pertahanan RI dari Belanda yaitu dengan adanya Serangan Umum 1 Maret yang membuktikan bahwa kekuatan militer RI masih ada dan disini juga dijelaskan bahwa Yogyakarta dipertahankan selama 6 jam hingga pukul 12.00 WIB dengan pengiriman bantuan pasukan Belanda dari Magelang. Di buku ini juga dijelaskan perpisahan Sukarno dan HB IX saat ibukota dipindahkan kembali ke Jakarta.

## **E. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Untuk menjaga fokus kajian maka dibutuhkan batas spasial dan temporal dalam penulisan sejarah. Ruang lingkup spatial kajian ini adalah Yogyakarta dan



Jakarta yang menjadi ibukota RI masa revolusi. Cakupan temporal penelitian ini adalah waktu pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta dan dari Yogyakarta kembali ke Jakarta dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1949. Alasannya adalah pada tanggal 4 Januari 1946 ibukota pindah ke Yogyakarta, sedangkan pada 29 Desember tahun 1949 ibukota Republik Indonesia kembali ke Jakarta.

## **F. METODE PENELITIAN DAN SUMBER PENELITIAN**

Sumber penelitian yang digunakan ada dua sumber yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer dari penelitian ini terdiri dari arsip-arsip yang dikoleksi di ANRI berupa dokumen, foto yang diambil dari IPPHOS (Indonesia Pres Photo Service) dan Surat kabar yang beredar pada tahun 1946 sampai dengan 1949 di Perpustakaan Nasional. Sedangkan sumber sekunder pada penulisan ini berdasarkan tinjauan pustaka yang digunakan seperti buku-buku yaitu Robert Cribb, *Para Jago Dan Kaum Revolusioner Jakarta (1945-1949)*, Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, W.P Suhartono, *Yogyakarta ibukota Republik*, Drs, Soeroso Dirjawijata, *Yogya Benteng Proklamasi*, S. Margana dkk, *Gelora Di Tanah Raja Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-1949* yang menjelaskan tentang proses pemindahan Ibukota ke Yogyakarta dan buku yang menjelaskan situasi pada tahun 1946-1949.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab I membahas mengenai latar belakang, pertanyaan penelitian, metode serta sumber, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas peristiwa seputar Proklamasi pada bab ini akan membahas peristiwa peristiwa sebelum dan sesudah Proklamasi. Bab III dibahas mengenai pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta alasan apa saja yang menyebabkan pemindahan, siapa saja yang pindah dan bagaimana penerimaannya. Bab IV membahas pemindahan ibukota dari Yogyakarta ke Jakarta. Bab V membahas kesimpulan.

## BAB II

### SITUASI SEPUTAR PROKLAMASI

#### A. Menyerahnya Jepang Kepada Sekutu

Jatuhnya pulau Iwo Jima ke tangan sekutu merupakan titik awal kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Kekalahan Jepang sendiri sudah di mulai tahun 1945 ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom Amerika.<sup>3</sup> Berdasarkan perundingan pada 26 Juli 1945, dalam pertemuan di Postdam, pihak yang kalah dalam perang diminta untuk menyerahkan wilayah yang dikuasai kepada pihak yang menang. Pemerintah Jepang diminta untuk segera menyerah tanpa syarat dan mengembalikan koloni lama yang telah diduduki oleh Jepang termasuk Indonesia. Sekutu segera menduduki koloni tersebut dan akan membentuk pemerintahan sendiri.

Kekalahan Jepang terhadap sekutu sudah sudah mulai terlihat dari masuknya pasukan Mac Arthur dalam dua tahun terakhir ke Filipina melalui Irian untuk mendekati kepulauan Jepang. Banyak kepulauan Pasifik yang dikuasai oleh Jepang jatuh ke tangan Sekutu diantaranya adalah pertempuran di Laut Filipina pada Tahun 1944. Hal ini merupakan kekalahan Jepang yang paling memalukan di Asia Tenggara yang merupakan kawasan pendudukan Jepang. Salah satu penyebab kekalahan ini adalah diikutsertakanya pilot-pilot Jepang yang baru dilatih 6 bulan dalam pertempuran ini, sedangkan pilot-pilot Sekutu yang ikut berperang telah berlatih selama dua tahun. Pada akhirnya pulau Iwo Jima berhasil direbut oleh Sekutu dan menjadi pintu gerbang Sekutu untuk mengalahkan Jepang

---

<sup>3</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan* (Yogyakarta: LKIS, 2008) hlm.7

di Pasifik dan mengakhiri Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik dengan merebut beberapa pulau di` kawasan Asia Pasifik seperti Irian dan Gibraltar.<sup>4</sup>

Sekutu akhirnya menjatuhkan bom atom di dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dan membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Kekalahan Jepang adalah karena strategi yang dijalankan oleh sekutu. Tanggal 1 Agustus 1945 terjadi pengeboman kota-kota Jepang bagian Selatan yang dilakukan oleh Amerika. Satu hari setelah kejadian tersebut terjadi pula pemboman atas kota Fukoka di Pulau Kyushu dan Marushima. Pada 3 Agustus 1945 Laksamana Nimitz menyatakan bahwa pesawat tempur Amerika telah menutup pelabuhan-pelabuhan Jepang dan Korea sehingga blokade menjadi sempurna. Jenderal Mac Arthur menyatakan bahwa tentaranya di kepulauan Ryuku dan Filipina sudah bersiap-siap menyerbu Jepang pada 4 Agustus,<sup>5</sup> 5 Agustus kota-kota di Pulau Kyushu dan tempat lainnya diserang oleh 4000 pesawat tempur Amerika disusul dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima yang terletak di Pulau Honsyu oleh sebuah pesawat pembom Amerika pada 6 Agustus. Kota lainnya juga diancam dengan pemboman yang sama yang membuat kabinet Jepang segera bersidang.<sup>6</sup>

Pesawat-pesawat pembom Amerika pun mengebom pangkalan angkatan laut Toyakoma. Tanggal 8 Agustus 1945 pesawat-pesawat pembom Amerika menghantam pusat-pusat militer dan perindustrian Jepang dan pada 9 Agustus bom atom yang kedua dijatuhkan di Nagasaki, pantai barat Kyushu. Pesawat pembom Amerika menjatuhkan berjuta-berjuta selebaran di Jepang yang berisi ancaman pengeboman dengan bom atom kembali, sekiranya jika Jepang tidak

---

<sup>4</sup> P.K Ojong, *Perang Pasifik* (Jakarta: Kompas, 2004) hlm. 10

<sup>5</sup> A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid I: Proklamasi*, (Bandung: Angkasa, 1977) hlm.1-3

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.6

mau menyerah. Sementara itu pada hari yang sama tentara Uni Soviet yang besar jumlahnya menyeberangi tapal batas Manchuria, sepanjang sungai-sungai Amur dan Usari.

Tanggal 10 Agustus 1945 radio Tokyo menyiarkan kesanggupan Jepang untuk menyerah menurut pasal-pasal Potsdam atas kedudukan Tenno Heika sebagai kaisar Jepang yang dihormati dan pada 11 Agustus 1945 angkatan udara Amerika menyerang daerah Tokyo dan angkatan udara Uni Soviet mengamuk di Korea. Pada 12 Agustus 1945 Sekutu membom kembali Kyushu, 1.300 pesawat Jepang dihancurkan di sekitar Tokyo dan angkatan darat dan laut Uni Soviet menduduki pangkalan Laut Rashim di Korea. Pada 13 Agustus 1945, menurut Moskow, tentara Marsekal Malinowski telah maju sejauh 200 mil dalam tempo 4 hari dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Presiden Truman dan Perdana Menteri Attlee mengumumkan penyerahan Jepang yang tidak bersyarat. Tentara Uni Soviet terus menduduki Manchuria Timur dan Sakhalin Selatan.<sup>7</sup>

Tanggal 18 Agustus 1945 Menteri Luar Negeri Shigemitsu menyatakan kekalahan Jepang dan pada 19 Agustus 1945 perutusan Jepang menghadap Jenderal Mac Arthur di markas tertingginya di Manila. Dua hari kemudian, tanggal 20 Agustus 1945 tentara Uni Soviet menduduki Mukden, ibukota Manchuria dan pada 21 Agustus 1945 tentara Kwantung sebanyak 52.000 orang menyerah kepada tentara Uni Soviet. Tanggal 22 Agustus 1945 tentara Uni Soviet menduduki Port Arthur. Tanggal 23 Agustus 1945 Jepang mengumumkan bahwa korban yang di derita karena serangan udara Sekutu hampir berjumlah 10 juta orang. Tanggal 30 Agustus 1945 Marsekal Terauchi, panglima tertinggi kawasan.

---

<sup>7</sup> P.K Ojong, *Op.cit*, hlm.15

selatan, menyerahkan pedangnya kepada Laksama Lord Lois Mountbatten di Saigon. Dan di atas kapal perang *Glory*, Jenderal Imamura, panglima besar Pasifik Barat Daya, menyerah kepada Jenderal Sturdes dari Australia.<sup>8</sup> Upacara penandatanganan dilaksanakan pada tanggal 2 September 1945 pada pukul 10.30 waktu Tokyo diatas kapal perang *Missouri* milik Amerika Serikat di Teluk Tokyo. Upacara ini dihadiri oleh pihak Sekutu yang diwakili oleh Jenderal Mac Arthur sebagai panglima tertinggi Sekutu dan dihadiri oleh 50 orang jenderal dan laksamana Sekutu diantaranya adalah Laksamana Nimitz atas nama Amerika Serikat, Laksamana Sir Bruce Fraser atas nama Inggris, Jenderal Derecyanko atas nama Uni Soviet, dan Jenderal Sir Thomas Blamey atas nama Australia. Dan pemerintah Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Shigemitsu dan Jenderal Yoshijiro Umetsu dari markas tertinggi sebagai kepala Staf Umum tentara Kerajaan. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka Perang Pasifik dan Asia Timur Raya berakhir.<sup>9</sup>

Pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki mempercepat proses penyerahan Jepang terhadap Sekutu ini secara resmi diumumkan oleh P.M. Suzuki seusai diadakan sidang kabinet darurat pada 15 Agustus 1945, akan tetapi peresmian penyerahannya baru akan dilakukan pada 2 September 1945 di Teluk Tokyo. Kekalahan Jepang terhadap sekutu menjadikan Indonesia *Vacum of Power* yang berarti Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

---

<sup>8</sup> A.H. Nasution, *Op.cit.*, hlm. 184

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.185

Semenjak kedatangannya, Jepang telah memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia jika Jepang menang dalam perang tersebut. Kekalahan Jepang dalam perang pasifik, mempercepat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Jepang juga mendukung pembentukan BPUPKI (Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) di Indonesia yang telah melakukan rapat pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan menghasilkan dasar negara kemudian dikenal dengan nama Pancasila yang kemudian menjadi dasar ideologi negara Indonesia.<sup>10</sup>

Sekutu tidak menguasai Indonesia, tetapi diboncengi NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*/Pemerintah Sipil Hindia Belanda) yang ingin menguasai kembali Indonesia. Peluang Belanda untuk menguasai kembali Indonesia sangatlah besar.<sup>11</sup>

Kemerdekaan Indonesia akan direalisasikan setelah dibentuknya PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 9 Agustus 1945, yaitu setelah kembalinya Sukarno, Hatta dan dr. Radjiman yang diundang oleh Jenderal Terauchi ke markas besar di Dalat, Saigon pada 15 Agustus 1945.<sup>12</sup>

## **B. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**

Situasi kalahnya Jepang dari Sekutu dimanfaatkan oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sukarno dan Hatta didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi hal tersebut ditolak oleh golongan tua, maka terjadilah perselisihan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.124

<sup>11</sup> Suhartono W. Pranoto, *Yogyakarta Ibukota Republik*, (Yogyakarta: Kanisius 2002) hlm.125

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.126

kaum muda dengan kaum tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua ingin mengambil jalan tengah dengan menunggu persetujuan dari anggota PPKI yang bersidang tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda mendesak agar proklamasi tidak ada campur tangan Jepang yang berarti menolak pemberian kemerdekaan Indonesia dari Jepang, oleh karena itu Sukarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, yang berjarak sekitar 25 km di sebelah timur laut ibukota Jakarta.<sup>13</sup>

Menurut Mohammad Iskandar ada beberapa alasan Rengasdengklok dipilih yaitu, pertama, di samping letaknya cukup terpencil, sekitar 15 kilometer ke arah utara dari pertigaan Kedunggede, kekuatan PETA (Pembela Tanah Air) disana pro kalangan pemuda. Di Rengasdengklok mereka lebih siap berhadapan dengan Jepang. Kedua, PETA disana bersifat radikal dan sejajar dengan kelompok pemuda radikal di Jakarta untuk meneruskan rencana mereka membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok. Ketiga, rencana itu sepenuhnya didukung oleh kelompok PETA disana. Hal ini berguna untuk menghindari kecurigaan Jepang dengan menugaskan Shodanco PETA Singgih, Dr. Sucipto, Komandan Peta Jagamonyet dan Pemuda Sukarno ditugaskan untuk menculik kedua tokoh tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Suhartono W.P sesampainya di Rengasdengklok, rombongan dibawa ke tangsi PETA yang dihuni sekitar lima puluh orang di bawah Chudanco Dr. Sucipto. Pada waktu itu Bung Karno mengatakan bahwa rombongannya ditawan pemuda karena mereka mau mengadakan revolusi.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 127

<sup>14</sup> Taufik Abdullah, *Indonesia Dalam Arus Sejarah 6: Perang dan Revolusi* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012) hlm.119



Setelah ditunggu-tunggu, ternyata revolusi gagal, tidak sebagaimana yang direncanakan oleh mereka. Di Rengasdengklok, Bung Karno mula-mula tiba di tangsi Peta, kemudian ditempatkan di rumah wedana dan selanjutnya dipindah kerumah tuan tanah Cina. Para pemuda menawan mereka berdua dan menggempur serdadu Jepang. Sebagai penanggung jawab penculikan mereka mengatakan kepada Bung Karno bahwa revolusi batal diadakan di Jakarta pada tengah hari dan belum dapat kontak dengan Jakarta.<sup>15</sup>

Pada akhirnya Sukarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta setelah mendapat jaminan keamanan terhadap kedua pemimpin bangsa tersebut. Sidang PPKI berlanjut setelah mendapat fasilitas dan jaminan keamanan bagi anggota PPKI untuk melakukan sidang di rumah Laksamana Maeda yang merupakan panglima *Kaigun Bukanfu* (Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang). Mereka berdua kembali ke Jakarta pukul 20.00, rombongan singgah di rumah Bung Hatta, kemudian menuju tempat Maeda untuk mengadakan rapat dengan semua anggota PPKI dan Ahmad Subarjo diminta untuk menelepon anggota PPKI untuk berkumpul di Hotel Des Indies, akan tetapi karena suatu hal rapat tersebut dipindahkan ke rumah Maeda.<sup>16</sup>

Kapten Miyoshi menelepon Muhammad Hatta pada sore hari dan mengucapkan selamat atas kedatangannya di Jakarta ia juga meminta Sukarno dan Hatta untuk menemui Mayor Jenderal Nishimura pada malam itu. Muhammad Hatta meminta Miyoshi bertemu di rumah Maeda dan meminjamkannya untuk rapat PPKI setelah Sukarno bersedia. Sukarno berterimakasih kepada Maeda karena ia

---

<sup>15</sup> Suhartono W. Pranoto, *Revolusi Agustus: Nasionalisme terpasung dan Diplomasi internasional* (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001) hlm.65

<sup>16</sup> Suhartono W.P, *Op.cit* hlm.68

mau meminjamkan rumahnya. Di dalam rumah ada beberapa orang yang mengikuti rapat diantaranya Sukarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, dan Sayuti Melik dengan duduk melingkar di sebuah meja bundar. Kelima orang inilah yang nantinya membuat teks proklamasi, akan tetapi tidak ada seorang pun yang membawa teks proklamasi di dalam sakunya.

Pada lewat tengah malam. Sukarno mulai dengan usulan untuk mempersilakan Bung Hatta menyusun teks ringkas proklamasi karena bahasanya dianggap terbaik oleh Sukarno. Setelah itu teks tersebut didiskusikan bersama-sama. Hatta setuju. Tetapi balik mengajukan usul “apabila aku mesti memikirkannya, lebih baik bung menuliskan, aku mendiktenya”. Pada akhirnya semua setuju kalau kalimat pertama teks proklamasi diambil dari akhir alinea ketiga dalam rencana pembukaan UUD 1945. Maka kalimat pertama berbunyi, “Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”. Hatta harus memikirkan kalimat selanjutnya, sebab kalimat baru hanya menyatakan kemajuan bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri.<sup>17</sup>

Menurut Hatta, kalimat itu tidak cukup karena hanya menyatakan abstrak tanpa isi. Oleh karena itu dalam kata-kata Hatta, mesti ada “komplementasi” atau imbangannya yang mempertegas bagaimana kemerdekaan itu diselenggarakan. Untuk selanjutnya Hatta menambah argumennya “kita harus mengantarkan kemerdekaan kita pada pelaksanaan yang nyata dan kita tidak mungkin dapat berbuat demikian tanpa kekuasaan berada ditangan kita. Kita harus menambahkan pikiran tentang penyerahan kekuasaan dari Jepang ke dalam tangan kita sendiri”. Pada akhirnya Sukarno menuliskan kalimat yang didiktekan Hatta, “Hal-hal yang

---

<sup>17</sup> Taufik Abdullah, *Op.cit*, hlm.122

mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya”<sup>18</sup>

Setelah mereka berdua bertukar pikiran sebentar mengenai teks proklamasi itu, kelima orang ini bertindak selaku panitia kecil dapat menyetujuinya. Selanjutnya teks tersebut dibawa ruang tengah, di tempat anggota sidang sedang menunggu. Rumusan teks yang dibuat perlahan-lahan dan berulang-ulang dibacakan oleh Sukarno sebagai juru bicara konseptor proklamasi. Setelah rumusan teks tersebut dibacakan oleh Sukarno terjadi perdebatan mengenai teks, bahasa dan isinya, serta segala resiko yang akan timbul daripadanya. Perdebatan mengenai teks proklamasi berakhir pukul 03.00 pagi.<sup>19</sup>

Menjelang fajar 17 Agustus 1945, para pemuda merupakan kalangan yang paling lantang memperdebatkan teks Proklamasi. Mereka menuntut agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanpa persetujuan Jepang dan bahkan sebaliknya siap berhadapan menentanginya. Naskah teks proklamasi yang telah dirumuskan secara seksama dalam kata-kata oleh konseptornya yaitu Hatta, Sukarno, diikuti tiga tokoh yang mendampingi yaitu Ahmad Subardjo, Sukarni, dan Sayuti Melik dianggap masih terlalu lunak. Kelompok-kelompok Pemuda di Prapatan 10 diajukan ke tengah rapat. Draf naskah yang mereka tawarkan berbunyi pendek: “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya.” Sukarni atas nama pemuda menganggap teks tersebut kurang tegas. Terutama kalimat keduanya yang terlalu berhati-hati seraya menuntut agar diganti dengan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 123

<sup>19</sup> Taufik Abdulah, “Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia” dalam *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Perang Dan Revolusi jilid 6* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012) hlm.122

kata-kata berikut: “Semua aparat pemerintahan yang ada harus direbut oleh rakyat dari orang-orang asing yang masih mendudukinya.”<sup>20</sup>

Di dalam rapat itu suasana gelora jiwa pemberontakan dari pemuda, baik dalam cara mereka mengungkapkan pendapat maupun dalam rumusan teks proklamasi versi mereka. Rumusan versi pemuda itu mungkin akan lebih pendek lagi, apabila Mohammad Hatta tidak menambahkan kalimat lanjutannya. Namun kalimat yang diajukan pemuda agak bernada konfrontatif dan kebanyakan anggota dalam sidang itu tidak menanggapinya. Oleh karena itu gagasan para pemuda tentang teks tersebut harus masuk laci yaitu mengenai istilah penyerahan tidak dipakai tetapi diubah menjadi pemindahan. Setelah dibicarakan dengan pihak Jepang, kalimat “pemindahan kekuasaan” menurut Sihigetada Nishijima, digunakan sebagai terjemahan kasar dari kata-kata Jepang: *gyoseiken no iten* (pemindahan pengawasan administratif) dan” bukan dimaksudkan untuk melakukan penyerahan kedaulatan yang sah” (*shuken no hjoto*).<sup>21</sup>

Teks proklamasi yang dirumuskan oleh konseptornya mencoba memuaskan semua pihak, terutama mempertimbangkan masa-masa posisi Jepang, PPKI dan para pemuda, dan tentu saja tujuan dasarnya, yaitu tercapainya Indonesia merdeka. Setelah Sayuti Melik selesai mengetik naskah tersebut, ia membacakan teks proklamasi yang dibuatnya sekali lagi. Para pemuda dan PPKI menyetujuinya. Setelah itu Sukarno meyakinkan suara bulat dari kedua kalangan dan menandatangani teks tersebut. Akan tetapi rapat itu sejenak terdiam dan tidak ada satupun usul dari kedua kalangan. Mereka menolak untuk menandatangani

---

<sup>20</sup> Taufik Abdullah, *Op.cit*, hlm.123

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.123

teks proklamasi bersama dengan PPKI, yang dikenal oleh Chaerul Saleh karena dianggap sebagai orang-orang yang diangkat oleh Jepang. Para pemuda juga menuntut agar yang menandatangani bukan para utusan PPKI karena PPKI mewakili Jepang. Sukarni dan kawan-kawan pun mempunyai usul yang agak lunak, untuk menunjuk enam orang dari wakil-wakil mereka untuk menandatangani teks tersebut, tetapi bersama Sukarno dan Hatta. Akan tetapi usul ini tidak bisa diterima oleh mayoritas karena secara terang-terangan dianggap sebagai taktik dari para pemuda untuk melepaskan tanggung jawab atas semua dokumen yang sejak semula sudah tidak menyenangkan karena usul mereka sudah ditolak sebelumnya

Menurut W.P Suhartono dalam artikel berjudul “Di Rumah Maeda: Penyusunan Teks Proklamasi”, setelah mengalami perundingan yang menemui jalan buntu meskipun Soekarno tetap pada pendiriannya, yaitu ingin meneruskan rapat PPKI meskipun Jepang ingkar janji. Rakyat Indonesia akan memerdekakan dirinya sendiri dan gelora rakyat akan diperhatikan Sekutu, kecuali Belanda. Jepang pun diminta tidak menghalang-halangi rapat pelaksanaan proklamasi. Dengan berat hati Nishimura terpaksa tunduk kepada perintah Sekutu meski dalam hatinya tahu benar cita-cita bangsa Indonesia. Hasil dari rapat PPKI Ahmad Subarjo, Sukarno, dan Sayuti Melik menyusun teks proklamasi di sebuah ruangan di rumah Maeda dan Sayuti Melik meminjam mesin ketik milik Kantor Milliter Jepang. Nantinya teks proklamasi tersebut di bacakan oleh Soekarno.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Suhartono W. Pranoto “ Di Rumah Maeda: Penyusunan Teks Proklamasi dalam : *Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung Dan Diplomasi Internasional* ( Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001) hlm.74

Setelah jalan tengah diambil dan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, nama PPKI tidak diperlukan lagi, begitu juga nama para wakil pemuda. Pada akhirnya teks proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul tersebut disetujui dengan tepuk tangan meriah. Waktu sudah menuju pukul 05.00 pagi tetapi masih ada soal pelik lain yang masih harus dibicarakan, seperti tempat membacakan teks proklamasi, akan tetapi sejumlah kelompok pemuda menghendaki agar pembacaan dilakukan di Lapangan Ikada yang sudah direncanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Sudiro mendengarkan bisikan Dr. Muwardi untuk mengarahkan barisan pelopor.

Pada tanggal 17 Agustus Sukarno terbangun dalam keadaan sakit dan didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, namun Sukarno menolak karena Muhammad Hatta belum hadir, tapi setelah kehadiran Muhammad Hatta, Sukarno membacakan Proklamasi kemerdekaan Indonesia tepat di halaman rumah Sukarno, di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta pada pukul 10.00.<sup>23</sup>

Kantor *Domei* yang berkedudukan di Yogyakarta memberikan informasi tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada saat umat Islam sedang menjalankan ibadah salat Jumat melalui kotbah di Mesjid Besar yang terletak di Alun-Alun Utara.<sup>24</sup> Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII belum merespon berita proklamasi itu, akan tetapi setelah adanya keyakinan mengenai Proklamasi Kemerdekaan barulah kedua tokoh tersebut mendukung proklamasi. Mereka adalah orang pertama yang mengirim pesan melalui telegram kepada

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>24</sup> F.X. Sunarto, *Jogja Benteng Proklamasi* (Jakarta: Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Perwakilan Jakarta, 1985) hlm.10

Sukarno dan Mohamad Hatta menyampaikan selamat atas berdirinya Negara Republik Indonesia, dan atas terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sultan dan Paku Alam VII memanggil perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat di kepatihan pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 1945 itu agar mereka menjaga keamanan.<sup>25</sup> Keduanya mendukung dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia.<sup>26</sup>

### C. Kedatangan Tentara Sekutu

Tujuan utama sekutu ke Indonesia adalah untuk melucuti senjata Jepang dan membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan pada masa pendudukan Jepang. Pendaratan tentara Sekutu di Indonesia pada awalnya disambut dengan baik oleh rakyat, tetapi setelah mengetahui NICA meboncengi Sekutu sikap rakyat berubah menjadi curiga karena mereka ingin menguasai kembali Indonesia. Tentara Inggris datang dari Singapura menuju Indonesia menggunakan kapal dan mendarat di kota-kota di Indonesia yang memiliki pelabuhan seperti Medan, Jakarta dan kota lainnya.

Pemerintah RI mengajukan tuntutan kepada tentara Sekutu, agar diantara tentara yang mendarat di Indonesia hendaknya jangan ada bala tentara Belanda. Tuntutan Ini bukan semata-mata supaya menunjukkan kecurigaan kita terhadap Belanda dan bukan pula supaya menyatakan permusuhan kita dengan Belanda. Kepada pihak Belanda kita berkata, “Percayalah, bahwa kami sebenarnya tidak ada prioritas menghendaki permusuhan dan pertentangan dengan tuan. Percayalah

---

<sup>25</sup> Suhartono W.P, *Yogyakarta Ibukota Republik* (Yogyakarta: Kanisius, 2002) hlm.38

<sup>26</sup> Suhartono W.P, *Op.cit* hlm.39

bahwa kami sebenarnya mengharapkan penyelesaian soal-soal kami dengan tuan secara damai. Apa yang lebih dari pada damai?” Tetapi pihak sekutu tidak memenuhi permintaan Indonesia. Dalam situasi seperti ini Menteri Penerangan melakukan pidato. Isi pidato tersebut adalah sebagai berikut:

“Baru sekali ini kita dapat berkumpul untuk menghadapi dan menyiapkan diri hal yang penting. Disamping itu pada pertemuan kita sekarang ini. Dapatlah kita mengadakan pertukaran pikiran. Kita sudah sama-sama mengetahui penderitaan kita masing-masing dalam pekerjaan kita. Diantarannya karena pekerjaan kita, pekerjaan penerangan, adalah suatu pekerjaan yang *ondank baar*”.<sup>27</sup>

Di beberapa daerah di Indonesia sikap tentara Sekutu juga tidak bebas meskipun mereka lebih banyak membantu pihak Belanda di Kalimantan dan Indonesia Timur yang sebagian besar rakyatnya pro dengan Belanda, antara lain Manado dan Ambon, yang banyak direkrut menjadi tentara KNIL (*Koninklijke Indische Leger*/ Tentara Kerajaan Hindia Belanda) untuk bekerjasama dengan Belanda memerangi saudara mereka sendiri.<sup>28</sup>

Sikap tentara Inggris juga tidak jauh berbeda dengan sekutunya yaitu sama-sama menjadi alat untuk memberi kesempatan Belanda berkuasa kembali. Tidak hanya wilayah perkotaan saja yang dikuasai oleh Belanda dan sekutu tapi juga wilayah pedesaan, bahkan sebagian besar dari mereka memanfaatkan tentara Jepang yang menduduki Indonesia untuk bekerjasama dengan Sekutu. Tentara Belanda dimanapun berada selalu membuat kekacauan, baik di Jakarta maupun di Bandung. Di wilayah Bandung dan sekitarnya tentara Belanda bekerjasama

---

<sup>27</sup> Adam Malik; *Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945* (Jakarta: Wijaya, 1962) hlm.82

<sup>28</sup> A.H Nasution, *Sekitar perang kemerdekaan Indonesi Jilid II: Diplomasi atau bertempur* (Bandung: Angkasa, 1979) hlm.60



dengan Jepang dalam membuat kekacauan seperti pembunuhan dan pembakaran rumah-rumah penduduk.

Setelah sekutu datang, banyak pertentangan-pertentangan yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia dan sebagian besar wilayah Indonesia dikuasai kembali oleh NICA yang dibentuk oleh seorang Gubernur Jenderal bernama Dr. H.J. Van Mook.

Pada 7 Oktober, Dr, H.J. Van Mook mengadakan perundingan dengan Laksamana Mountbatten dan Jenderal Christison di Singapura. Perundingan ini menekankan agar pasukan Sekutu mengambil tindakan tegas pada pemerintah Republik Indonesia. Pada 13 Oktober 1945, Tentara Inggris mendarat di kota-kota seperti Padang, Medan dan menduduki Bandung. Pendudukan ini juga melibatkan tentara Belanda.

Tentara Belanda yang mendarat di Indonesia diboncengi oleh pihak Inggris dan mengklaim diri mereka adalah tentara sekutu, namun setelah berada di wilayah Indonesia mereka mengklaim dirinya sebagai Pemerintahan Hindia Belanda dan menamakan dirinya NICA. Pihak Belanda menduduki tempat-tempat penting bersama pihak Inggris dan menguasai wilayah laut dan kapal-kapal perangnya, sedangkan pesawat udara mereka dilengkapi persenjataan modern.<sup>29</sup>

Pada tanggal 20 Oktober 1945, Presiden Republik Indonesia, Sukarno mengirim kawat kepada Presiden Amerika Serikat, Truman, yang memprotes adanya kendaraan-kendaraan milik pihak Amerika dengan persenjataan lengkap

---

<sup>29</sup> A.H Nasution, *Op.cit* hlm. 83

yang digunakan oleh tentara Belanda untuk melakukan kekacauan di wilayah yang didudukinya.<sup>30</sup>

Pertempuran di berbagai daerah di Indonesia antara lain adalah Pertempuran Surabaya dan Pertempuran Palagan Ambrawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945 pasukan Sekutu mendarat di Semarang dan kemudian pergi menuju Ambarawa dan tiba di Magelang tanggal 26 Oktober 1945. Pertempuran yang terjadi di Ambarawa seakan-seakan membentuk satu garis medan, di mana rel kereta api di kota Ambarawa merupakan garis pemisahannya. Sementara pertempuran Surabaya pada 10 November merupakan pertempuran antara pihak Indonesia melawan Inggris. Pertempuran ini diawali dengan tertembak Jenderal Mallaby yang mendarat di Surabaya dan penolakan ultimatum dari Inggris dibawah pimpinan Jenderal Robert Mansergh yang berisi perintah agar semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum tersebut adalah tanggal 10 November 1945 jam 6.00 pagi. Tetapi ultimatum itu ditolak karena itu merupakan bentuk penghinaan bagi para pejuang Indonesia. Oleh karena itu terjadilah pertempuran 10 November yang menggempur kota Surabaya dari udara, darat dan laut oleh pihak Inggris. Ribuan pejuang Indonesia gugur dalam peristiwa tersebut. Pertempuran-pertempuran tersebut merupakan pertempuran Indonesia melawan sekutu.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Peter Carey, *Gelora Api Revolusi* (Jakarta, Gramedia, 1991) hlm. 50

<sup>31</sup> Peter Carey, *Op.cit* hlm.55



**Gambar 1**

Keterangan Gambar 1: Perundingan pertama antara pemerintah Indonesia, Belanda dan Inggris di Markas besar Tentara Inggris pada 17 November 1945 di Jalan Imam Bonjol I, Jakarta. Dalam perundingan tersebut nampak hadir dari pihak Belanda: Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J Van Mook, Dr. Cho van der Plas, Dr. PJA. Idenburg, dan Prof Baron Van Asbeck. Di Pihak Indonesia hadir: Perdana Menteri, Sutan Syahrir; Menteri Penerangan, Mr. Amir Sjarifudin; Menteri Pekerjaan Umum, Ir. Putuhena, dan Menteri perhubungan, Ir. Abdul Karim. Sementara pihak Inggris dihadiri oleh: Letnan Jenderal Sir Philip

Christison, Dr. M.E. Dening (Penasihat Politik Kementerian Luar Negeri Inggris)  
dan Brigadir Jenderal Wingrave.<sup>32</sup>

Perundingan yang dihadiri tiga pihak tersebut membahas mengenai masalah senjata dari kedua pihak yang berperang dan Belanda sebagai mediator. Perundingan tersebut dilakukan seminggu setelah Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Inggris mengakui belum menenukan adanya tanda-tanda melemahnya perlawanan rakyat Indonesia.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Pramodya Ananta Toer, *Kronik Revolusi Indonesia Jilid I 1945* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999) hlm.160-161

<sup>33</sup> *Koleksi ANRI, foto Ipphos 0052*

### BAB III

## PEMINDAHAN JAKARTA-YOGYAKARTA

#### A.Situasi Jakarta

Ketika Jepang menyerah, Lord Mountbatten sebagai komandan Sekutu di Asia Tenggara memerintahkan tawanan perang Sekutu dan tawanan lain di Jakarta untuk tetap di tempat tahanan mereka. Penerapan perintah itu ditaati untuk keselamatan para tahanan, akan tetapi Mountbatten lebih mengkhawatirkan kebangkitan para tahanan yang mengancam otoritas Sekutu di wilayah tersebut sehingga tentatarnya gagal mengendalikan situasi kemanan. Situasi inilah yang membuat Mountbatten memilih menunda kedatangan tentara Sekutu dan menyerahkan tanggung Jawab formal wilayah ini kepada pihak Jepang dengan ancaman pengadilan perang.<sup>34</sup>

Pihak Jepang diperintahkan oleh Mountbatten untuk menjaga kemanan dan ketertiban sampai tentara Sekutu tiba. Para tahanan menganggap aturan tersebut terlalu samar-samar dan para tahanan tersebut mengabaikan perintah untuk tetap berada di dalam penjara. Beberapa hari setelah Jepang menyerah, orang-orang Belanda baik pihak sipil maupun militer mulai terlihat di jalan-jalan Jakarta.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, situasi ibukota Jakarta rusuh alias tidak aman karena terdapat unsur-unsur yang saling berlawanan. Di satu pihak masih ada pasukan Jepang yang memegang *status quo*, sedangkan di pihak lain adalah Sekutu. Mereka juga memasuki ibukota Jakarta. Tentara NICA membakar rumah-rumah penduduk di Jatinegara hingga menjadi abu. Tidak hanya pribumi saja

---

<sup>34</sup> Gunawan Rijadi, “Jagoan Dalam Revolusi Kita”, *Prisma* no. 10, tahun 1981, hlm. 41-50.

yang jadi korban kebrutalan tentara NICA tapi juga etnis Tionghoa, bahkan tentara NICA juga akan melakukan pemboman daerah Menteng.<sup>35</sup>

Saat orang-orang Belanda mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak orang-orang Belanda yang menanggapi dengan tidak mengakui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atau tidak percaya bahwa Indonesia telah merdeka. Ketika Republik mampu mempertahankan kekuasaan dan menghadapi golongan nasionalis muda terkuaklah betapa besar kebencian orang-orang Indonesia atas kembalinya Belanda menguasai Indonesia yang diboncengi oleh Sekutu dan NICA. Pada akhir Agustus 1945 sebagian besar orang-orang Belanda yang masih menetap berusaha memulihkan keadaan seperti masa sebelum perang.<sup>36</sup>

Upaya yang dilakukan badan perjuangan di Jakarta tidak berhasil melawan tentara Jepang dan Sekutu baik dalam penyerangan atau pertahanan, hal ini dikarenakan kemampuan militer yang dimiliki oleh Sekutu dan Jepang lebih superior dari segi latihan, disiplin, pengalaman dan persenjatan yang lebih unggul. Kondisi ini berbeda dengan persenjataan yang dimiliki kaum pejuang nasionalis badan perjuangan. Sejak awal revolusi Jepang dan Sekutu sudah mampu memegang komando untuk wilayah terbuka yang sangat luas di Jakarta.<sup>37</sup>

Belanda menduduki kompleks-komplek yang telah membentuk pasukan KNIL yang sebagian besar didominasi oleh orang-orang yang berasal dari

---

<sup>35</sup> Mohammad Roem, *Bunga Rampai Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972) hlm.72

<sup>35</sup> Robert Cribb, *Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta* (Jakarta: Masub, 2002) hlm.20

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.87

<sup>36</sup> Robert Cribb, *Op.cit*, hlm.21

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.88

Minahasa dan Ambon. Agen -agen NICA banyak berkeliaran di Jakarta dan seringkali mereka membenci orang-orang yang tidak pro dengan Belanda yang banyak membantu dalam pengendalian situasi di Jakarta yang ingin dikuasai.

Teror di Jakarta mulai berkecamuk. NICA melakukan provokasi dan menembak di sana-sini. NICA melaporkan kepada Inggris tentang adanya perampokan yang merajalela di Jakarta. Inggris pun mengerahkan pasukan India dengan melakukan pengepungan, penggerebekan dan pembersihan terhadap rumah-rumah penduduk.

Disisi lain NICA juga melakukan tindakan tidak manusiawi yang sangat brutal yaitu mereka memperlakukan pejuang-pejuang Indonesia dengan melakukan penyembelihan seperti hewan di depan para penumpang di dalam kereta api dan mereka juga langsung menembaki mereka dari rumah-rumah Belanda tanpa pandang bulu.<sup>38</sup>

Jakarta menjadi tidak aman sejak kedatangan pasukan NICA dan adanya usaha pembunuhan terhadap beberapa tokoh seperti Syahrir dan Sukarno. Tidak hanya NICA saja yang membuat tidak amannya Jakarta tapi tentara liar atau laskar yang dipersenjatai yang berpotensi menimbulkan pertumpahan darah. Laskar berasal dari bahasa Urdu, *lashkar* yang berarti tentara atau milisi, namun pada masa perang kemerdekaan istilah laskar merujuk kepada tentara liar dimana mereka berpakaian seperti rakyat biasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.<sup>39</sup>

Tidak hanya pertumpahan darah dari kedua pihak saja yang membuat tidak aman tetapi juga tindak kejahatan seperti perampokan, pemerkosaan, penculikan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.40

<sup>39</sup> Robert Cribb, *op.cit* hlm.96-97

dan pembunuhan oleh para laskar terhadap orang-orang Tionghoa dan orang-orang yang pro dengan Belanda, baik orang Ambon maupun Minahasa, yang setia kepada Belanda sejak masa penjajahan. Sering juga terjadi bentrokan antara laskar dan tentara Indonesia yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Perampokan seringkali dilakukan oleh laskar merah yang merupakan sebuah organisasi liar yang dipersenjatai dan bekerjasama dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang membuat kerusuhan dan tidak aman.<sup>40</sup>

Pertempuran antara NICA dengan TKR telah menewaskan 3 anggota NICA dan seorang anggota TKR yang diberitakan di koran Harian Merdeka 12 Oktober 1945<sup>41</sup>. Pertempuran ini juga melibatkan orang-orang Tionghoa dan menyebabkan belasan penduduk mengalami luka berat termasuk dari etnis Tionghoa yang disebabkan oleh perbuatan sewenang-sewenang NICA.

---

<sup>40</sup> Robert Cribb, *Gangster And Revolutionaries* (Honolulu: Universitu of Hawaii Press, 1991) Robert Cribb Bridson, Para Jago dan kaum Revoulsioner

<sup>41</sup> Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* (Jakarta: TransMedia, 2008) hlm.563





**Gambar 2**

Keterangan gambar 2: Dalam foto tersebut terlihat para prajurit TRI bersiaga menyambut Jenderal Sudirman untuk menghadiri perundingan senjata antara Indonesia dan Belanda di markas besar Tentara Inggris di Jakarta pada tanggal 2 November 1946. Dalam foto ini, TRI yang merupakan tentara resmi, mengenakan seragam dan bersenjata lengkap serta memakai atribut yang lengkap.<sup>42</sup> Gencatan senjata merupakan pemberhentian konflik sementara dari kedua pihak yang sedang berperang, Indonesia dan Belanda untuk sementara tidak berperang dan beristirahat terlebih dahulu sebelum akhirnya saling berperang

---

<sup>42</sup> Pramodeya Ananta Toer, *Kronik Revolusi Indonesia Jilid I* (Jakarta: KPG, 1999) hlm.491

kembali. Sementara itu di negeri Belanda laporan yang berisi ikhtisar Komisi *Koets* yang diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia melalui Mingguan Indonesia memberitakan mengenai keadaan Indonesia pasca genjatan senjata dengan Belanda. Mendengar hal ini orang-orang Indonesia di negeri Belanda sangat gembira karena kedua pihak yang sedang berperang berhenti berperang untuk sementara.<sup>43</sup>

## **B. Sukarno Memindahkan Ibukota dari Jakarta Ke Yogyakarta**

aSementara itu percobaan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Sjahrir semakin gencar dilakukan oleh pihak NICA pada 26 Desember 1945, Tetapi usaha pembunuhan tersebut gagal sehingga selamatlah Perdana Menteri Sutan Sjahrir.<sup>44</sup>

Alasan Sultan Hamengku Buwono IX menawarkan Yogyakarta sebagai ibukota republik karena tidak adanya pemimpin daerah lainnya yang mau menerima kota tersebut sebagai ibukota dan pada masa itu kota-kota lain tidak aman karena adanya pertempuran-pertempuran besar yang menyebabkan kerusakan berat pada kota di daerah-daerah yang terjadi pertempuran.

Menanggapi kejadian tersebut Sultan HB IX dan Paku alam VIII di Yogyakarta mengirim kawat kepada Sutan Syahrir melalui Amir Sjarifudin atas selamatnya Sutan Syahrir dari percobaan pembunuhan yang terjadi pada 26 Desember 1945 dan pada 4 Januari 1946 Amir Sjarifudin menyatakan: “Sikap laskar -laskar di Jakarta yang brutal dan tidak manusiawi juga menyebabkan kota

---

<sup>43</sup> *Koleksi ANRI, foto Ipphos 0197*

<sup>44</sup> Pramodeya AnantaToer, *Kronik Revolusi Indonesia jilid II* (Jakarta: KPG, 1999) hlm.274

Jakarta menjadi tidak aman, dan laskar-laskar tersebut merupakan pasukan liar yang sebenarnya adalah sampah masyarakat seperti perambok, pencuri dan preman yang direkut untuk ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.”<sup>45</sup>

Pada 2 Januari 1946 Sultan mengirim kurir ke Jakarta meminta agar pemerintah pusat segera menyingkir ke Yogyakarta.<sup>46</sup>

Menurut Cindy Adam pada 3 Januari 1946 Sukarno memberi tahu para Menteri, pengawal dan pembantu-pembantu yang setia menemaninya dan berkata: “Kedudukan pemerintahan harus dipindahkan ke daerah yang bebas dari gangguan Belanda sehingga dapat mendirikan benteng Republik”.<sup>47</sup> Sukarno pun pun memindahkan ibukota Republik pada malam hari. Beliau pun tidak membawa harta-benda, hal ini dikarenakan tidak ada waktu untuk membereskan perabotan rumah tangga. Beliau beserta keluarganya tinggal di depan rel kereta api. Sukarno memberhentikan kereta api di depan rumahnya pada pukul enam sore. Rangkaian kereta tersebut sengaja digelapkan dan berhenti tanpa mengeluarkan suara.<sup>48</sup>

Pada tanggal 4 Januari 1946 pemerintah Republik Indonesia menyiarkan pengumuman sebagai berikut:

“Berhubung dengan keadaan di kota Jakarta pada dewasa ini, pemerintah Republik Indonesia menganggap perlu akan Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan di luar Jakarta.

Oleh sebab itu kemarin Presiden dan Wakil Presiden telah berangkat ke tempat kedudukan yang baru.”<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> Suhartono W. Pranoto, *Op.cit* hlm. 60

<sup>46</sup> Adam Malik, *Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945* (Jakarta: Wijaya, 1962) hlm.50

<sup>47</sup> Cindy Adams, *Biografi Bung Karno* (Jakarta: Gunung Agung, 1966) hlm. 10

<sup>48</sup> Cind Adams, *Op.cit* hlm.12

<sup>49</sup> Pramodya Ananta Toer, *Op.cit* hlm.6

Mr Amir Syarifudin, Menteri keamanan merangkap Menteri Penerangan, telah meletakan jabatan sebagai Menteri penerangan dan sekarang berkedudukan di Yogyakarta. Dengan pindahanya ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta maka kantor Menteri Penerangan secara resmi pindah juga ke Yogyakarta bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden meskipun Sutan Syahrir tetap di Jakarta. Sukarno dan Hatta menaiki kereta api menuju Yogyakarta dan akhirnya mereka tiba di Yogyakarta dengan selamat.<sup>50</sup>

Jakarta pada awalnya digunakan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial dan politik. Namun karena revolusi di Jakarta maka berubah pula posisi politik strategis kota itu. Pada tahun 1945-1949 kota tersebut harus melepas statusnya sebagai ibukota Republik, oleh karena itu Jakarta bukanlah kota pusat revolusi bergejolak, seperti semasa revolusi di bawah pendudukan kekuasaan asing seperti Inggris dan Belanda. Sementara itu Yogyakarta sepenuhnya tetap berada dibawah kekuasaan republik di saat revolusi sedang bergejolak.<sup>51</sup>

Yogyakarta dipilih sebagai ibukota republik karena pada awal revolusi Yogyakarta merupakan kota yang masih aman belum diduduki oleh pihak sekutu baik Inggris dan Belanda hingga Agresi Militer Belanda II. Namun semangat Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia tidak padam, meskipun Ibukota RI pindah ke Yogyakarta.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Berita Indonesia*, 4 Januari 1946

<sup>51</sup> Robert Cribb, *Gejolak Revolusi Di Jakarta 1945-1949* (Jakarta: Grafiti, 1990) hlm.70

<sup>52</sup> Suhartono W. Pranoto, *Op.cit*, hlm.60

Menurut Farabi Fakhri dalam artikel “Revolusi Optik: Yogyakarta Sebagai Model Republik”<sup>53</sup> alasan Sukarno memilih Yogyakarta sebagai ibukota juga karena Yogyakarta ingin dijadikan kota progresif Republik yang multikultur dan multietnis. Yogyakarta juga menjadi tempat berkumpulnya para pejuang dari berbagai daerah untuk mempertahankan kemerdekaan.

Farabi Fakhri menyatakan “Pemilihan Yogyakarta sebagai ibukota memiliki implikasi yang luas. Yogyakarta sebagai ibukota dijadikan sebagai kota impian atau model Republik yang diwujudkan Sukarno. Tujuan Sukarno memilih Yogyakarta sebagai ibu kota adalah menjadikan kota propaganda untuk menunjukkan keberhasilan Republik dan proyek pembangunan pemerintah Republik pertama kali diujicobakan.”<sup>54</sup>

Dampak dari pemindahan ibukota ke Yogyakarta adalah para pejabat negara, baik sipil dan militer, para pegawai beserta keluarganya Sukarno beserta kabinetnya harus pindah dan begitu juga kedutaan-kedutaan besar yang ada di. Konsekuensinya Yogyakarta harus menampung 50.000 orang yang terdiri dari berbagai macam latar belakang etnis, suku dan agama mereka masing-masing. Selama ibukota hijrah ke Yogyakarta para pejabat dan Presiden menggunakan gedung-gedung yang ada di Yogyakarta. Sejak pindahnya ibukota ke Yogyakarta untuk sementara maka para pemimpin negara, militer dan tokoh-tokoh lainnya harus pindah juga ke Yogyakarta.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Farabi Fakhri, “Revolusi Optik: Yogyakarta Sebagai Model Republik” dalam Sri Margana., *Gelora Di Tanah Raja: Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-1949* (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017) hlm.37

<sup>54</sup> Sri Margana, *Op.cit* hlm.38

<sup>55</sup> *Ibid*, hm.39

Sejak saat itu Yogyakarta memfasilitasi jalannya pemerintahan RI. Seketika setelah datang, Sukarno dan Hatta tinggal di Pura Pakualam karena sebagian dari Gedung Agung waktu itu masih dalam kondisi rusak karena dibom oleh Jepang. Setelah diperbaiki dan layak dipakai oleh pihak Kraton, Bung Karno dan Bung Hatta tinggal di gedung tersebut.<sup>56</sup> Fasilitas dan gedung-gedung peninggalan Belanda juga dijadikan tempat tinggal Sukarno dan Mohamad Hatta beserta jajaran kabinetnya seperti para Menteri dan duta besar yang mengakui kemerdekaan Indonesia diberikan fasilitas oleh Sultan.

Dalam UUD No 6 Tahun 1948 mengatur mengenai penggunaan gedung-gedung di Yogyakarta yang digunakan oleh para pemimpin negara. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan mengenai penggunaan gedung oleh para pejabat dan duta besar selama ibukota RI berada di Yogyakarta. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa para pejabat negara seperti Presiden, Wakil Presiden beserta para Menteri diberi hak untuk menggunakan gedung yang ada di Yogyakarta selama menjadi ibukota.

Duta dari beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia dapat menggunakan beberapa gedung di Yogyakarta sebagai tempat sementara selama Jakarta belum aman. Beberapa gedung Sukarno tempati digunakan sebagai tempat tinggalnya selama ibukota hijrah ke Yogyakarta begitu juga dengan Hatta dan para pejabat pemerintahan lainnya.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Sudomo Sunaryo & Haryadi Baskoro., *Wasiat HB IX: Yogyakarta kota Republik* (Yogyakarta: Galang Press, 2011) hlm 7

<sup>57</sup> *Arsip Djogja dokumen Koleksi ANRI, No. 9. UU No 62 tahun 1948*





**Gambar 3**

Keterangan gambar 3: Hubungan Indonesia dengan Belanda memburuk sejak adanya gejolak tahun 1945-1949. Para politikus, pelajar, seniman bahkan buruh dan pelaut-pelaut Indonesia yang bekerja di kapal milik Belanda sekalipun sebagian besar meninggalkan negeri Belanda.<sup>58</sup> Mereka kembali ke Indonesia menggunakan kapal laut melalui Inggris. Akan tetapi, ketika di Inggris para pelaut tersebut hendak dipekerjakan kembali sebagai pelaut, namun mereka menolaknya. Pada tanggal 21 November 1945, 50 orang Indonesia berlayar dari Liverpool, Inggris menuju Jawa, Indonesia. Mereka terlebih dahulu singgah di Bombay, India dan Singapura sebelum tiba kembali di Indonesia.

---

<sup>58</sup> Harry Poeze, *Orang Indonesia di Negeri Belanda* (Jakarta: KPG, 2008) hlm.364

Orang-orang Indonesia kembali dari Belanda pada tahun 1947. Mereka datang dengan menaiki kereta api menuju Yogyakarta yang sudah menjadi Ibukota Republik Indonesia dimana yang pindah ke Yogyakarta tidak hanya para pejabat tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Para pejabat seperti Sukarno dan Mohammad Hatta beserta duta besar negara lainnya sudah pindah ke Yogyakarta terlebih dahulu, sementara orang-orang Indonesia yang menetap di Belanda baru ke Yogyakarta setahun setelah pejabat negaranya pindah.

Dalam foto tersebut terlihat suasana penyambutan orang-orang Indonesia yang baru kembali dari negeri Belanda. Mereka amat santai seperti terlihat dalam foto dimana seorang wanita sedang memegang cangkir di gerbong kereta api dengan pakaian yang mewah dan seluruh orang-orang Indonesia yang kaya raya yang terdiri dari pelajar, politikus dan seniman terlihat santai. Dalam foto tersebut mereka terlihat berpakaian rapi layaknya orang-orang Belanda terlihat pria mengenakan jas dan kemeja putih dan wanita mengenakan gaun.<sup>59</sup>

### **C. Pidato Menteri Penerangan Mr Ali Sastromidjojo**

Berkaitan dengan pemindahan ibu kota, Wakil Menteri penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo di depan corong RRI Yogyakarta pada Januari 1946 malam menyampaikan pidatonya.

“Sebelum kamu menyiarkan beberapa pengumuman resmi maka lebih dahulu kami menyampaikan salam nasional kita, Merdeka! Saudara-saudara, pertama kami atas nama Pemerintah mengumumkan dengan resmi bahwa mulai pagi ini tanggal 4 Januari 1946 sebagian dari pemerintah Agung buat sementara dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta.

---

<sup>59</sup> : *koleksi ANRI, foto Ipphos 0307*



Dari sebab itu mulai hari ini Presiden kita Bung Karno dan Wakil Presiden Bung Hatta buat sementara waktu berkedudukan di kota Mataram.... berhubung dengan pemindahan sebagian dari Pemerintah Agung ke Yogyakarta ini perlu agaknya diterangkan di sini, bahwa hal itu tidak usah menggoncangkan hati kita. Pemindahan ini tidak menjadi sebab untuk menegubah pendirian terhadap luar maupun dalam negeri. Pemindahan sementara itu beralasan dalam hal, pertama, keadaan tidak aman yang terdapat di Jakarta, kedua, untuk menyempurnakan organisasi dalam negeri.... Akan tetapi sebetulnya lebih pentinglah alasan yang tersebut kedua, tadi untuk memindahkan buat sementara kedudukan Pemerintah Agung. Alasan itu pada hakikatnya mengenai bagian yang terpenting daripada perjuangan kita, bahkan dari revolusi rakyat Indonesia pada masa ini. Sebab Pemerintah Agung mulai sekarang kedudukannya yang baru, ialah kota Mataram akan dapat melangsungkan lebih tepat dan cepat segala pimpinan dan usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintahan di daerah-daerah, bahwa penyempurnaan organisasi-organisasi itu senantiasa dilakukan, terbukti dari perubahan-perubahan dalam susunan Pemerintah Agung yang kami umumkan tadi. Dengan demikian maka koordinasi yang tersusun, yang menjadi syarat mutlak untuk berputarnya roda pemerintahan dengan licin, tindakan lekas tercapai.”<sup>60</sup>

Dalam perkembangannya, keadaan di Yogya memang lebih kondusif bagi Pemerintah RI untuk menyusun langkah-langkahnya, untuk membangun organisasi yang lebih kuat. Sementara itu, penjajah Belanda terus berusaha untuk merebut dan menguasai Indonesia kembali, Dalam hal inilah Yogya menjadi benteng pertahanan terakhir bagi Republik Indonesia.

---

<sup>60</sup> Suhartono W. Pranoto, *Yogyakarta Ibukota Republik* (Yogyakarta: Kanisius, 2002)hm.60

#### D. Yogyakarta Sebagai Kota Pertahanan dan Pusat Pemerintahan

Yogyakarta berperan penting menjadi pusat militer Indonesia pada masa itu khususnya markas Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibawah pimpinan Jenderal Oerip Soemahardjo dan Jenderal Sudirman. Saat pasukan Sekutu mendarat di Jawa dan bergerak menuju pedalaman, TKR mengadakan rapat nasional panglima divisi dan resimen di Yogyakarta untuk memilih jabatan panglima dengan persetujuan Jenderal Sudirman sebagai panglima TKR.<sup>61</sup>



**Gambar 4**

Keterangan gambar 4: Konferensi Pertama TKR yang dilaksanakan pada 10 November 1945 bertempat di Alun-alun utara Yogyakarta. Tampak dalam foto

---

<sup>61</sup> Sri Margana, *Gelora di Tanah Raja: Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-1949* (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017) hlm.20

Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sebagai raja dari Kesultanan Yogyakarta (kiri) dan Sri Pakualam VIII (kanan). Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku pendiri laskar yang bernama TRM (Tentara Rakyat Mataram) tampak dalam foto berseragam tentara begitu juga dengan Sri Pakualam VIII mengenakan seragam yang sama. Tampak dalam foto konferensi ini dihadiri juga oleh berbagai elemen masyarakat baik pria, wanita maupun anak-anak.<sup>62</sup>

Saat Yogyakarta menjadi ibukota Republik para pejabat menempati beberapa gedung seperti Gedung Agung, Kantor Kepatihan Yogyakarta dan kantor kementerian Penerangan yang dilakukan oleh Panitia Perumahan yang merupakan tanggung jawab dari penggunaan gedung-gedung di Yogyakarta.

Tampak dalam foto tidak ada pembatasan antara sipil dan militer dalam konferensi tersebut. Masyarakat yang mengikuti konferensi pertama TKR merasa tenang dan tidak merasa bahwa acara tersebut adalah acara khusus untuk militer.<sup>63</sup>

Sebelumnya pada tanggal 12 Oktober 1945 dilakukan pergantian nama dari BPRI (Badan Pemberontak Rakyat Indonesia) Mataram menjadi TRM yang peresmian dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan juga berlangsung di tempat yang sama. Pada tanggal 18 Desember 1945 Jenderal Sudirman dilantik oleh Presiden Sukarno sebagai Panglima Tertinggi TKR menggantikan Supriyadi di Alun-alun utara Yogyakarta.<sup>64</sup>

Yogyakarta selain sebagai ibukota RI juga sebagai kota perjuangan. Dimana selama ibukota berada di Yogyakarta, Yogyakarta menjadi pusat

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm.30

<sup>63</sup> *Koleksi ANRI, Foto Ipphos 0042*

<sup>64</sup> Suhartono. W. Pranoto, *Op.cit* hlm .49

pertahanan di Indonesia pada masa Revolusi. Angkatan Pemuda Indonesia yang pada awalnya didirikan di Jakarta akhirnya meluas ke kota-kota besar di Indonesia termasuk Yogyakarta. BKR (Badan Kemanan Rakyat) dibentuk di Jawa Tengah pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan Mayor Jenderal Sudarsono sebagai pimpinan BKR Divisi IV Yogyakarta dan Letnan Kolonel Umar Joi sebagai kepala Staf. Sebelum BKR dibentuk sudah ada organisasi pemuda semi militer dengan nama BPU (Barisan Penolong Umum). BPU terdiri dari tiga orang pemimpin yaitu Umar Slamet mantan *Chudanco* di Bantul, S, Parman, dari *kenpeitai* dan Sudarto sebagai pemimpin Pasukan Pelajar. Mereka melakukan gerakan yang illegal dan pengumpulan senjata sebagai modal untuk bertempur melawan Sekutu.<sup>65</sup>

Pada tanggal 5 Oktober 1945, sesuai dengan dekrit pemerintah, nama BKR berubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Tanggal 1 Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat berganti menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat). Dan pada tanggal 24 Januari 1946 Tentara Keselamatan Rakyat berganti nama menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Kemudian TRI berubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada 3 Juni 1947.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Suhartono W. Pranoto, *Op.cithlm.* 51

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.62



**Gambar 5**

Keterangan gambar 5: Semboyan perjuangan di pagar Gedung Agung Yogyakarta tahun 1947 yang bertuliskan *We Don't Want To Be Ruled By Any Other Nation* (Kami Tidak mau Dikuasai Negara lain). Hal ini dilakukan secara spontan untuk melawan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Slogan-slogan heroik yang dituliskan di tembok menggunakan bahan cat minyak diperoleh dari toko besi. Aksi ini biasa dilakukan di tempat-tempat strategis, seperti Jalan Malioboro, pagar Hotel Garuda dan tempat lainnya. Setelah Yogyakarta berhasil direbut oleh Belanda melalui Agresi militer Belanda I pada tahun 1947, para seniman tidak lagi melakukan aksi grafitinya di tembok karena masalah keamanan<sup>67</sup>. Sebagai gantinya digunakan media berupa poster.

---

<sup>67</sup> koleksi ANRI, Foto Ipphas 0059



Poster-poster tersebut ditempelkan pada malam hari. Sukarno merupakan orang yang pertama kali menggunakan poster sebagai media propaganda bahkan sejak awal kemerdekaan Indonesia. “ Boeng, Ajoeng Boeng” merupakan poster pertama yang digunakan olehnya sebagai media propaganda semangat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda.yang ingin menguasai kembali Indonesia.<sup>68</sup>

Pada tanggal 17 Juli 1946 Dr. Mustopo meresmikan berdirinya Tentara Pelajar sebagai pertahanan RI di Yogyakarta. Untuk selanjutnya, TP digabungkan dengan Brigade 17 Pelajar yang diresmikan oleh Presiden Sukarno pada 17 November 1948 di Kepatihan Yogyakarta. Kolonel Sudarto diangkat sebagai Komandan dari Brigade TP.<sup>69</sup>

Belanda mulai melakukan Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947 yang bertujuan untuk menghancurkan kekuatan militer RI. Belanda juga mengepung ibukota RI, Yogyakarta. Yogyakarta adalah pusat pertahanan RI pada masa Revolusi. Hal ini menyebabkan beberapa pasukan TNI berjaga-jaga diberbagai titik di Yogyakarta. Diantarannya bersiaga di depan Pasar Beringharjo. Logistik untuk keperluan perang mempertahankan Yogyakarta diangkut menggunakan gerobak yang ditarik dengan dua ekor sapi. Pasukan Belanda yang berada di Barongan, yang berkekuatan lebih kurang satu kompi, sering melakukam patroli ke daerah-daerah yang dianggap markas gerilya berdasarkan informasi mata-mata mereka. Namun gerakan gerilya yang berpindah-pindah tempat dan dilindungi

---

<sup>68</sup> Sri Margana, *Op.cit* hlm.48

<sup>69</sup> Suhartono W. Pranoto, *Op.cit*, hlm.54

oleh masyarakat di daerah pedesaan yang selalu sepi membuatnya sulit ditangkap.<sup>70</sup>

Persenjataan TNI masih sangat terbatas dan membuatnya menjadi kurang efektif saat menghadapi Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli tahun 1947. Hal ini yang menyebabkan TNI banyak meninggalkan kota-kota dan melakukan gerilya semesta yang berbasis di pedesaan. Partisipasi rakyat pedesaan sangat mempengaruhi pertahanan TNI sebagai alat pertahanan negara. India pun memberikan bantuan berupa obat-obatan ke Indonesia, khususnya ke Yogyakarta, sebagai bentuk bantuan kemanusiaan pada saat Yogyakarta diinvasi oleh Belanda. Obat-obatan tersebut digunakan oleh para pejuang yang terluka akibat serangan peluru dan senjata lainnya dari Belanda.<sup>71</sup>

Pada 21 Juli 1947 pukul 19.00 Presiden Sukarno berpidato kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato tersebut Sukarno menyatakan bahwa:

1. Pihak Belanda secara terang-terangan telah menyerang dengan senjata dari darat dan udara.
2. Serangan Belanda itu adalah serangan terhadap kemerdekaan dan keadilan. Tindakan sewenang-wenang yang didorong oleh nafsu kebuasan serta penjajahan dan berdasar pada kepercayaan kepada kekerasan serta paksaan.
3. Apa yang dituduhkan oleh Belanda kepada Republik sebagai kecurangan dan pelanggaran di dalam penyelenggaraan perdamaian.

---

<sup>70</sup> Dharmono Hardjoeidjono, *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta jilid II* (Yogyakarta: Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1985) hlm.40

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm.73

Bagi orang yang masih mempunyai perasaan keadilan serta kebenaran tidak berarti sama sekali. Sebab Republik Indonesia baru dua tahun berdiri meliputi daerah yang amat luas, dan berpenduduk banyak sekali, apa lagi masih dalam kurungan militer, politik dan ekonomi.

4. Kemerdekaan yang telah kita capai dan kita beri bentuk Republik ini, telah tumbuh dengan baik dan bertambah sempurna; hal ini diakui oleh bangsa-bangsa yang besar.
5. Pelanggaran Belanda terhadap penjanjiannya dengan kita adalah pemangkiran penghargaan pada kemerdekaan, keadilan serta kebenaran.
6. Karena kita yakin bahwa kebenaran dan keadilan ada di pihak kita, maka dengan penuh kepercayaan kita bersedia menyerahkan soal perselisihan Indonesia-Belanda kepada U.N.O (*United Nations Organisation*/Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan kita mengharap agar negara-negara yang cinta kemerdekaan serta keadilan bersedia membawa perselisihan tersebut ke dalam sidang U.N.O <sup>72</sup>
7. Kita harus tetap teguh dalam iman kita bahwa kita akan dan pasti dapat menolak segala serangan terhadap Republik kita.

Sementara pada malam hari yang sama, Perdana Menteri Amir Sjarifuddin berpidato pula yang isinya antara lain sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Pihak Belanda telah mengumumkan bahwa kekuatan militernya telah mulai bertindak, dan tindakan tersenut oleh pihak Belanda disebut “aksi polisionil”.

---

<sup>72</sup>*Ibid.* hlm.60

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm.61



2. Dengan tindakan tersebut berarti bahwa Belanda telah meninggalkan jalan damai, meninggalkan Perserikatan Bangsa- Bangsa meninggalkan Pengadilan Internasional.
3. Pihak Indonesia menyadari bahwa dunia Internasional menantikan adanya penyelesaian secara damai persengketaan Indonesia dan Belanda, agar perdagangan dapat berkembang kembali dan produksi berjalan lagi.
4. Naskah Persetujuan Linggarjati baru ditandatangani 4 bulan sesudah diparaf, sebab sebelumnya pihak Belanda main tafsir seenaknya sendiri.
5. Pihak Belanda selalu melanggar garis demokrasi dan gencatan senjata
6. Menurut Persetujuan Linggarjati, tentara Belanda harus dikurangi jumlahnya, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, jumlah tentara Belanda malah ditambah hingga mencapai jumlah yang melebihi apa yang sudah disetujui dalam perjanjian gencatan senjata.
7. Kita adalah rakyat yang merdeka dan bersatu, kecuali itu kita adalah rakyat yang bernegara, sehingga kita tidak mengakui tindakan polisionil di daerah kita.<sup>74</sup>

Jenderal Sudiarman selaku Panglima Besar TNI berpidato pula yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Karena Pemerintah Republik Indonesia bersikap tegas, tidak akan memberi tambahan konsesi kepada Belanda, tidak mau menelan semua usul Belanda, maka pemerintah Belanda telah mengambil putusan untuk memberi kuasa penuh kepada Dr. Van Mook untuk sewaktu-

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm.63

waktu mengambil tindakan terhadap Republik Indonesia dengan mempergunakan seluruh kekuatan militer.

2. Tadi pagi serangan umum dengan mempergunakan pesawat udara telah dimulai oleh tentara Belanda, serangan tersebut dilakukan secara membabi buta di mana daerah pedalaman juga dijadikan sasaran.
3. Serangan itu berarti bahwa Belanda telah memperkosa perdamaian dan kemerdekaan salah satu bangsa di muka bumi ini.
4. Sekarang telah tiba saatnya bagi semua lapisan rakyat Indonesia untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh sumpah Tuhan dan Ibu Pertiwi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semboyan cinta kemerdekaan
5. Kemerdekaan yang telah kita proklamirkan dan kita pertahankan 22 bulan lebih wajib kita lindungi dan kita pertahankan sampai titik darah penghabisan.
6. Kita harus insaf dan ingat bahwa korban telah banyak, penderitaan tidak sedikit, karena itu jangan sekali-kali kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia kita lepaskan dan kita serahkan kepada siapapun yang akan menjajah dan menindas kita.

Sutan Syahrir meninggalkan Yogya pada 21 Juli 1947 dan berangkat luar negeri membawa pesan istimewa dari Pemerintah Republik untuk memberi keterangan. Sutan Syahrir mengunjungi tiga negara yaitu Amerika Serikat, Inggris dan India.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Kronik Revolusi Indonesia, Jilid II* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014) hlm.30

Agresi Militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948. Akibat Agresi Militer itu para pemimpin negara termasuk Sukarno dan Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka jatunya ibukota negara ini menyebabkan dibentuknya PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) di Sumatra yang dipimpin oleh Sjariruddin Prawiranegara atas mandat pemerintahan di Yogyakarta sebelumnya. Belanda menggunakan kekuatan militernya yang berjumlah 135.000 orang dengan perlengkapan perang modern. Pasukan Indonesia tidak mampu menahan serbuan Belanda ke ibukota RI Yogyakarta dan daerah-daerah lainnya. Pada pukul 05.30 tanggal 19 Desember 1948 pesawat-pesawat pembom Mitchell (B.25) Belanda yang juga mengerahkan pasukan Baret Hijau dibawah pimpinan kolonel Van Langen menyerang Lapangan Terbang Maguwo. Ibukota Yogyakarta di bombardir oleh pesawat Lockheed dan Mitchell yang melayang-layang di atas kota Yogyakarta. Untuk mengelabui pasukan TNI, Belanda menjatuhkan boneka-boneka dari pesawat terbang Belanda yang juga digunakan untuk mengalihkan pasukan TNI sebagai penjaga keamanan kota Yogyakarta. Perlawanan yang dilakukan oleh kesatuan TNI tidak dapat membendung serangan Belanda sehingga pada akhirnya Belanda berhasil menguasai lapangan terbang Maguwo yang terletak di bagian barat kota Yogyakarta.<sup>76</sup> Di saat yang bersamaan, berlangsung perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang diawasi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), yaitu Belgia, Australia dan Amerika Serikat. Perundingan ini diadakan di Kaliurang, Yogyakarta.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX merencanakan Serangan Umum 1 Maret tahun 1949 dengan pertimbangan seksama dari segala segi, baik sosial maupun

---

<sup>76</sup> F.X Sunarto, *Op.cit* hlm.131

militer. Hal terberat yang dipertimbangkan adalah pembalasan kekejaman Belanda terhadap rakyat Yogyakarta. Pada hari H serangan tersebut bersamaan dengan bunyi sirene yang menandakan berakhirnya jam malam di kota Yogyakarta terdengar suara tembak menembak antara TNI dan Belanda. Serangan tersebut mengutamakan sasaran tempat musuh seperti tempat komunikasi, gudang perbekalan mesiu, Istana Presiden, Hotel Tugu, kantor pos, gedung bekas MPT (Markas Polisi Tentara), Stasiun Kereta Api Kota Baru dan Pabrik Watson. Pada pukul 11.00 bantuan pasukan Belanda dari Magelang tiba di Yogyakarta sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang antara kekuatan TNI dan Belanda. Pukul 12.00 pasukan-pasukan gerilyawan mundur dalam serangan tersebut. Kota Yogyakarta dipertahankan selama 6 Jam yaitu pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00.

Pada tanggal 29 Juni 1949 pasukan Belanda ditarik mundur dari kota Yogyakarta dengan melalui 4 tahap sesuai dengan rencana Belanda. Penarikan tersebut berlangsung sebagai berikut:

- Tahap I: Tentara Kerajaan Belanda mulai menarik pasukannya pada pukul 07.00 dari bagian selatan kota Yogyakarta di Jalan Sentul, Secodingratan, Ngabean, dan Wirobrajan. Kemudian pasukan TNI masuk bagian kota tersebut sampai garis lebih kurang 500 meter dari jalan-jalan tersebut.
- Tahap II: Penarikan tentara Kerajaan Belanda dimulai pukul 09.30 di antara jalan-jalan dan rel kereta api. Kemudian TNI memasuki bagian sebelah selatan jalan kereta api kurang lebih 500 Meter.

- Tahap III: Tentara Kejaan Belanda di sebelah utara jalan kereta api dan sebelah barat Kali Code pada pukul 11.30 kemudian TNI menduduki bagian kota tersebut.

Pada saat yang sama pesawat Terbang Mo-Hawks Belanda dan sebuah pesawat capung mengawasi penarikan mundur tentara Belanda dari Yogyakarta agar berjalan tertib dan tepat pada waktu yang sudah direncanakan. Proses penarikan tentara Belanda dilakukan dengan berjalan kaki seperti saat menyerbu kota Yogyakarta. Barang-barang mereka diangkut menggunakan truk.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>*Ibid*, hlm.146-161



**Gambar 6**

Keterangan gambar 6: Pasukan Garuda Mataram melakukan perlawanan terhadap aksi gerilya Belanda di sekitar Yogyakarta pada tahun 1949. Nampak dalam foto tersebut adalah Letkol Suharto (tengah) bersama kawan-kawan seperjuangan.<sup>78</sup>

*Fluistercamapagne* dilakukan oleh HB IX dan PA VII bahwa seolah-olah mereka berdua akan meletakkan jabatan mereka berdua menjelang Serangan Umum 1 Maret. Serangan tersebut dilancarkan di Yogyakarta untuk menunjukkan peran strategi Yogyakarta dalam menegaskan eksistensi Indonesia di mata dunia.

---

<sup>78</sup> *Koleksi ANRI, foto Ipphos 1520*

HB IX merupakan orang yang mencetuskan ide Serangan Umum I Maret. <sup>79</sup> Pada 13 Februari 1949 Letkol Suharto dipanggil ke Kraton Yogya oleh Sultan HB IX dan menanyakan kesanggupan melakukan serangan umum itu Hotel Tugu merupakan sasaran utama dalam serangan tersebut dan beliau juga mewanti-wanti agar tidak ada peluru nyasar di hotel tersebut dimana tim PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menginap. <sup>80</sup>

Letkol Suharto sebagai pemimpin Serangan Umum I Maret melakukan serangannya pada siang hari dengan sasaran ke markas musuh yaitu Benteng Vredeburg, kantor pos, Istana kepresidenan, Hotel Tugu, stasiun kereta api, bekas markas bekas tentara dan kompleks Kota Baru. Serangan tersebut dilakukan untuk memperkuat dan menunjang mental pejuang-pejuang RI menghadapi Belanda dan merebut kembali Yogyakarta sebagai ibukota RI. <sup>81</sup> Selain tujuan utamanya untuk merebut kembali Yogyakarta, tujuan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Ke dalam negeri:

- Mendukung perjuangan yang dilaksanakan secara diplomasi
- Meninggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya melawan Belanda

2. Ke luar negeri:

- Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada
- Mematahkan moral pasukan Belanda

---

<sup>79</sup> Sudomo Sunaryo & Haryadi Baskoro, *Wasiat HB IX: Yogyakarta kota Republik* (Yogyakarta: Galang press, 2011) hlm. 165

<sup>80</sup> Sudomo Sunaryo & Haryadi Baskoro *Op.cit*, hlm.166

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm.145-147



## BAB IV

### PEMINDAHAN IBUKOTA DARI YOGYAKARTA KE JAKARTA

#### A. Perundingan Indonesia-Belanda

Republik Indonesia telah menerima Persetujuan Linggarjati tahun 1946 yang memungkinkan dibentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat), yang terdiri atas tiga negara bagian, yaitu: RI yang meliputi Jawa, Madura dan Sumatera dengan penduduk sebanyak 60 juta jiwa; Kalimantan kira-kira 2½ juta penduduk; dan Indonesia Timur dengan penduduk kira-kira 12 juta. Tiap negara bagian itu akan mempunyai pemerintahan sendiri, yang tidak berdiri di bawah pemerintah pusat; ketiga-tiganya, tanpa memperhatikan luas wilayah dan jumlah penduduknya, akan mendapat kedudukan yang sama dan suara yang sama dalam senat.<sup>82</sup>

Perundingan Renville merupakan titik balik antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan tersebut berlangsung di kapal milik Amerika Serikat bernama Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta pada tanggal 8 Desember 1947. Pada tanggal 17 Januari 1948 Pejanjian Renville yang ditandatangani oleh Amir Syarifudin, Sukarno dan Muhammad Hatta, berisi: menerima mediator PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), persetujuan gencatan senjata dan kedaulatan Indonesia diserahkan kepada RIS. Tetapi pada kenyataannya Belanda melakukan Agresi Militer II.

---

<sup>82</sup> Djenai Sidik Suraputra, *Revolusi Indonesia Dan Hukum Internasional* (Jakarta: UI Pres, 1991) hlm.10





**Gambar 7**

Keterangan gambar 7: Letkol Mokoginta (kiri) memberikan laporan kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman (kanan) bahwa pasukan dari Divisi Siliwangi telah dipindahkan dari Jawa Barat ke Yogyakarta sebagai dampak dari Perjanjian Renville pada tanggal 12 Februari 1948.<sup>83</sup> Hal ini dilakukan karena wilayah yang masih diakui wilayah RI hanya Yogyakarta.<sup>84</sup>

Dua bulan sesudah penandatanganan Perjanjian Renville tersebut, dimulailah perundingan pertama yang berlangsung pada 17 Maret 1948 dimana komisi ekonomi dan keuangan menyetujui perjanjian mengenai pengiriman logistik. Pengiriman beras untuk keperluan daerah yang dikuasai Belanda di

---

<sup>83</sup> koleksi ANRI, foto Ipphos 0750

<sup>84</sup> Pramodeya Ananta Toer, *Kronik Revolusi Indonesia jilid IV: Periode Linggajati* (Jakarta: KPG, 2014) hlm.20

daerah-daerah Republik sebelah garis *status quo*, yaitu daerah Kemit di bagian selatan Jawa Tengah.<sup>85</sup>

Ratu Juliana pun telah merencanakan kedaulatan RIS dalam pidatonya pada tanggal 6 Januari 1949. Berikut isi pidatonya:

”Pada tahun 1949 ibunda kami sudah mengucapkan harapan semoga Indonesia dan Belanda, sesudah kemenangan bersama terhadap musuh, dengan kerelaan hati dan dalam suasana kemerdekaan dan persamaan derajat akan bekerja bersama untuk memperoleh kembali perdamaian dan kebahagiaan. Perkataan beliau pada ketika itu bukan hanya menyatakan suatu harapan saja akan tetapi mengandung juga suatu janji.”

“Dalam bulan Febuari 1949 ibunda kami mengulangi pula janji itu. Pada saat itu beliau menerangkan. dengan mengingat pada perkatan-perkatan pejuang kemerdekaan yang besar bahwa usaha bersama itu hendaknya diartikan lebih luhur daripada mencapai kemerdekaan belaka, tetapi hendaknya ditunjukan pula mencapai kemerdekaan beragama, kemerdekaan berbicara dan kebebasan dari ketakutan dan kemelaratan. Dalam suasana percaya dan mempercayailah hendaknya kerjasama yang baru dapat tumbuh untuk membentuk suatu negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, sederajat dengan negeri Belanda didalam uni-Belanda Indonesia.

Beliau mengakhiri pidato tersebut dengan kata-kata:

“Baik Negeri Belanda, maupun Indonesia menanti-nantimu hari itu, pada saat dimana negara Indonesia Serikat... Sejak permulaan pemerintah kami, usaha-usaha kami selalu ditujukan guna sungguh-sungguh menepati janji ibunda kami, guna membantu turut menjamin perdamaian kebahagiaan dan kemakmuran bagi rakyat-rakyat Indonesia di dalam suatu pemerintahan sendiri yang berdaulat. dengan senang hati dapat kami katakan, bahwa daerah-daerah yang besar dari Indonesia telah bersedia bekerja bersama guna mencapai tujuan ini. Sayang sekali bahwa di daerah-daerah lainnya tenaga, yang lebih menyukai kekejaman dan kekacauan

---

<sup>85</sup> A.H Nasution, *Op.cit* hlm. 36

daripada kerjasama yang teratur, lebih besar kekuasaannya daripada orang-orang yang juga berada disana yang hendak membangun suatu tata tertib hukum baru dalam perhubungan baik dengan negeri Belanda. Oleh sebab itu pada akhirnya suatu aksi militer tak dapatlah dielakan. Maksudnya ialah bukan untuk menarik kembali janji yang mengenai Indonesia yang telah diberikan dengan penuh kidmat oleh Ibunda kami dan Bangsa Belanda seluruhnya, melainkan semata-mata hendak membuka kemungkinan-kemungkinan, supaya kini didapatlah diberikan dengan segera ketertiban, kemakmuran, kebebasan, kemerdekaan dan kedaulatan kepada Indonesia dalam suatu negara hukum federal. Dengan pemakluman keputusan “pemerintahan Indonesia dalam masa peralihan”, Maka kini telah dibuat suatu langkah yang penting artinya kearah pembentukan suatu pemerintahan Indonesia sendiri.”<sup>86</sup>

*New York Times* tanggal 3 Maret 1949 menyatakan, bahwa Indonesia menyambut dingin terhadap usulan Belanda untuk mengadakan konferensi di Den Haag. Hal itu tidak mengherankan. Harian ini mengkritik Belanda, dan mengharapkan agar dunia internasional tetap memperhatikan masalah Indonesia guna menemukan tercapainya penyelesaian yang adil.<sup>87</sup>

Perjanjian Rum-Royen ditandatangani oleh Dr. Van Royen mewakili pemerintah Belanda dan Mr. Muh. Rum mewakili pemerintah Indonesia pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indies, Jakarta. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang menguntungkan bagi Indonesia karena dalam perjanjian tersebut berisi pernyataan bahwa tentara Belanda harus menghentikan operasi militernya, pembebasan tahanan politik dan pemberian hak, kekuasaan dan kewajiban kepada pihak Indonesia yang merupakan pintu gerbang menuju KMB (Konferensi Meja

---

<sup>86</sup> *Arsip Segneg ANRI no.2: Pidato Ratu Juliana 6 Januari 1949*

<sup>87</sup> Djenai Sidik Suraputra, *Op.cit* hlm.12

Bundar). Perundingan ini justru membuka jalan baru bagi penyelesaian konflik Indonesia -Belanda.



**Gambar 8**

Keterangan gambar 8: H. Merle Cohran (kanan) Perwakilan *UNCI* (*United Nations Comission For Indonesia*) dari Amerika Serikat bersalaman dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX (kiri) di Bandar Udara Kemayoran, Jakarta 11 April 1949.<sup>88</sup> Dari ekspresinya, terlihat HB IX senang dan tersenyum lebar menyambut delegasi PBB. Tujuan Sultan ke Jakarta adalah untuk berunding

---

<sup>88</sup> kolesi ANRI, foto Ipphos 1040



tentang pengembalian Yogyakarta ke pihak republik pasca Agresi Militer Belanda

II.<sup>89</sup>



**Gambar 9**

Keterangan gambar 9: Sukarno mengantarkan Mohammad Hatta ke Lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Mohammad Hatta ditunjuk sebagai ketua delegasi Indonesia untuk menghadiri KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, Belanda pada tanggal 7 Agustus 1949 yang dihadiri oleh Mohamad Rum, Abdul Rivai, Dr. J. Leimena dan Kolonel Simatupang sebagai delegasi dibidang militer serta kedua anggota UNCI (*United Nations Commission for*

---

<sup>89</sup> Pramodya Ananta Toer, *Kronik Revolusi Indonesia jilid V 1949* (Jakarta: KompasPopuler Gramedia, 2014) hlm.76

*Indonesia*).<sup>90</sup> H. Merle Cochran dan R. Herema, Nampak dalam foto tersebut Sukarno (kanan) berjabat tangan dengan Muhamad Hatta(Kiri) dan berpamitan dengan para Menteri sebelum berangkat ke Den Haag.<sup>91</sup>

Tetapi sebelum mereka tiba, mereka terlebih dahulu singgah di New Delhi dan disambut oleh wakil Indonesia di India, Dr. Sudarsono, untuk berziarah ke makan Mahatma Gandhi dan meletakan karangan bunga.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> *Koleksi ANRI, foto Ipphos 1344*

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm.167

<sup>92</sup> Pramodya Ananta Toer, *Op.cit* hlm. 168-169



**Gambar 10**

Keterangan gambar 10: Nampak dalam foto Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Kordinator dan Keamanan (kiri) dan Merle Cohran (kanan) sebagai salah satu anggota UNCI (*United Nations Comissions for Indonesia*/Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia) dari Amerika Serikat yang ingin menyaksikan perundingan Indonesia-Belanda secara langsung pada tanggal 24 April 1949 di Jakarta.<sup>93</sup> Hal ini disebabkan karena delegasi Indonesia meminta kedatangan Wakil Presiden, Muhammad Hatta dari Bangka

---

<sup>93</sup> *Koleksi ANRI, Foto Ipphos 1059*

untuk memecahkan kesulitan akibat lambannya perundingan, bahkan hampir menemui jalan buntu.<sup>94</sup>

### **B. Pemindahan Ibukota dan Pembentukan Negara Federasi Indonesia**

Pada tanggal 14-16 Desember 1949 berlangsung Pertemuan Musyawarah Federal bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56. Dalam sidang tersebut diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RIS dan sebagai ketua panitia pemilihan nasional tersebut adalah Mr. Mohamad Rum. Akhirnya Ir. Sukarno terpilih sebagai presiden RIS.<sup>95</sup>

Pada 17 Desember 1949 Ir. Sukarno dan Muhammad Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RIS oleh ketua MA (Mahkamah Agung), Mr. Kusumah Atmaja, di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta. Pelantikan ini juga dihadiri oleh Sultan Hamengku Buwono IX yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan RIS.<sup>96</sup>

Saat pelantikan presiden Sukarno, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo berpidato sebagai berikut:

“Sukarnya kiranya dinamis, maka saudara-saudara sekalian, kewajiban bagi saya ialah untuk saudara-saudara sekalian sekalian, yang saya maksudkan dengan perkataan dinamis itu tadi, bahwa kita harus meninjau sesuatu, segala sesuatu, sebagai barang-barang yang tidak statis, kataku di dalam pidato yang saya maksudkan. Bahwa kita dan saya sendiri pun harus melihat segala sesuatu itu di dalam hukum Panta Rei: segala sesuatu mengalir. *Alles vloeit*. Tidak ada sesuatu hal yang berhenti. Maka oleh karena itu, tegas pula di dalam alam pikiran saya, dia sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, bahwa RIS ini belumlah tujuan kita yang

---

<sup>94</sup> Promedya Ananta Toer, *Kronik Revolusi Indonesia Jilid V 1949* (Jakarta: Kompas Populer Gramedia, 2014) hlm. 81-82

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm.156

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm.159



terakhir. Di dalam hukum Panta Rei, RIS adalah satu bagian saja daripada aliran besar daripada sejarah yang tunduk kepada hukum Panta Rei itu tadi. Kita harus menjadi satu bangsa yang ingin mencapai tingkat-tingkat yang lebih tinggi dari apa yang telah kita capai sekarang, yaitu Republik Indonesia Serikat.”<sup>97</sup>

Pada tanggal 27 Desember 1949 berlangsung upacara penyerahan kedaulatan di dua tempat yaitu Den Haag dan Jakarta. Wakil Presiden RIS Muhammad Hatta menerima penyerahan kedaulatan RIS (Republik Indonesia Serikat) dari Ratu Juliana. Sementara upacara penyerahan kedaulatan di Jakarta dilakukan oleh Wakil Pemerintah Belanda di Indonesia, D.R Lovink kepada Sultan Hamengku Buwono IX selaku Menteri Pertahanan RIS. Upacara ini dihadiri juga oleh para wakil dari negara-negara sahabat seperti Arab Saudi, Pakistan, India, Burma, Muangthai, Filipina, dan negara sahabat lainnya.<sup>98</sup>

Konferensi Meja Bundar di Den Hagg, Belanda berdampak juga terhadap Jakarta yaitu menjadi aman setelah pengakuan Belanda terhadap RIS ( Republik Indonesia Serikat).

Setelah Sukarno kembali dari pengasingannya di Bangka, beliau kembali ke Yogyakarta terlebih dahulu pada tanggal 6 Juli 1949 sebelum akhirnya kembali ke Jakarta. Sebelum Sukarno berangkat menuju Jakarta, Sukarno menuliskan sebuah pesan yaitu: “Yogyakarta menjadi termasyhur oleh karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaann itu” dan Sultan HB IX mengucapkan kata perpisahan kepada Sukarno sambil meneteskan air mata dengan berkata: “Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi, silakan lanjutkan

---

<sup>97</sup> A.H Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia 11: Periode KMB* (Bandung: Bandung Angkasa, 1979) hlm.393

<sup>98</sup> A.H Nasution, *Op.cit* hlm. 396

pemerintahan ini di Jakarta” hal ini dikarenakan gedung-gedung di Yogyakarta yang sudah tidak memadai untuk menjalankan pemerintahan.<sup>99</sup>

Sukarno kembali ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesian Airways dan mendarat di Bandar Udara Kemayoran pada tanggal 28 Desember 1949, Jakarta pada pukul 11.40. Sukarno didampingi Duta Besar India dan Pakistan, ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan delegasi RIS, Prawoto Mangkusasmito, disambut oleh Menteri pertahanan RIS, Sultan Hamengku Buwono IX.<sup>100</sup> Saat tiba kembali di Jakarta, rakyat Jakarta menyambut Sukarno dengan meneriakkan pekik merdeka berkali-kali. Berdasarkan berita harian umum tanah air ratusan rakyat Jakarta menyambut presiden dengan mengatakan pekik merdeka berkali-kali dan Mr. Assaat menjadi Presiden Republik Indonesia dalam bentuk kesatuan. Tujuan kedua duta besar tersebut ke Jakarta adalah untuk membuktikan kalau duta besar negara-negara yang sudah mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi pindah ke Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari pindahnya Ibukota Republik Indonesia Serikat dimana Indonesia saat itu berbentuk Federasi, yaitu terdiri dari negara-negara bagian.<sup>101</sup>

Berdasarkan berita harian umum *Tanah Air*, ratusan rakyat Jakarta menyambut presiden dengan mengatakan pekik merdeka berkali-kali dan Mr. Assaat menjadi Presiden Republik Indonesia. Sukarno mengangkat Mr. Assaat sebagai *acting* Presiden untuk memberi kesan kepada negara lain bahwa negara Indonesia berbentuk kesatuan.

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 102-103

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm.397

<sup>101</sup> Surat kabar *Tanah Air* 29 Desember 1949

Negara-negara bagian Indonesia sejak berbentuk serikat terdiri dari Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, sementara itu daerah yang tetap menjadi kesatuan adalah Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur sampai dengan 17 Agustus 1950 dimana Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm.158



**Gambar 11**

Keterangan gambar 11: Jakarta kembali menjadi ibukota RI pada tanggal 28 Desember 1949 tetapi status Jakarta adalah ibukota RIS yang terdiri dari beberapa negara bagian.<sup>103</sup> Nampak dalam foto tersebut Presiden Sukarno melantik anggota Parlemen RIS (Republik Indonesia Serikat) di Istana Negara Jakarta pada 17 Februari 1950 yang merupakan ibukota RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950 bertepatan dengan hari kemerdekaan yang ke 5 negara Indonesia yang berbentuk federasi telah resmi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Jakarta secara resmi menjadi ibukota RI.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> koleksi ANRI, foto Ipphos 1617

<sup>104</sup> R. Sukandar, *Memoar Perjuangan Menegakan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945* (Yogyakarta: Yayasan Wiratama 45, 1949) hlm. 263

## BAB IV

### Kesimpulan

Pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta tidak lepas dari situasi ibukota Jakarta pasca proklamasi yang tidak aman akibat ulah NICA dan laskar yang membuat kekacauan di ibukota. Percobaan pembunuhan terhadap Sutan Syharir, Sukarno dan Muhammad Hatta juga menyebabkan ibukota harus dipindahkan. Sukarno dan Muhamad Hatta memutuskan untuk Hijrah ke Yogyakarta sementara Sutan Syahrir memutuskan untuk tetap berada di Jakarta. Ibukota RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX memberikan fasilitas dan mengeluarkan UU pada 6 Januari 1948 tentang penggunaan Gedung di Yogyakarta.

Yogyakarta dipilih menjadi ibukota RI karena Yogyakarta pada masa awal Revolusi sebelum dikuasai oleh Belanda. Selain karena alasan kemanan dimana Yogyakarta selalu menjadi wilayah RI, tujuan Sukarno memilih kota ini sebagai ibukota adalah untuk propaganda yang menunjukkan bahwa RI masih ada di mata dunia. Selama Yogyakarta menjadi ibukota RI, Yogyakarta menjadi pusat pertahanan untuk menangkal Agresi Militer Belanda I. Meskipun dapat dikuasai NICA pada Agresi Militer Belanda II, kota ini memberikan perlawanan melalui peristiwa yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret dibawah pimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menunjukkan kekuatan TNI sebagai pertahanan dari serangan Belanda dan Yogyakarta dipertahankan selama 6 Jam sejak pukul 06.00 hingga pukul 12.00 sampai dengan bantuan pasukan Belanda dari Magelang tiba.

Perjanjian-perjanjian seperti Perundingan Linggarjati dan Renville tidak membuahkan hasil dan justru Belanda melanggar kedua perjanjian tersebut dengan melakukan Agresi Militer I dan Agresi Militer II. Perundingan Roem-Royenlah yang sangat menguntungkan Indonesia hal ini karena perundingan ini membuka jalan untuk KMB di Den Haag, Belanda, yang kemudian dapat menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda sehingga Jakarta dan kota-kota lainnya menjadi aman . Hasil dari perundingan tersebut adalah Belanda resmi mengakui Indonesia dalam bentuk serikat. Pada 28 Desember 1949 ibukota RIS dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta akan tetapi Sukarno sudah berada di Jakarta sejak tanggal 28 Desember 1949. Akan tetapi RIS tidak bertahan lama. Desakan dari rakyat untuk kembali menjadi negara kesatuan semakin menjadi-jadi. Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS resmi bubar dan kembali menjadi negara kesatuan dan Jakarta resmi kembali menjadi ibukota RI.

## Daftar Pustaka

### Arsip

Arsip Segneg ANRI no.6: *Pidato Ratu Juliana 6 Januari 1949*

Arsip Djogja dokumen no.9: *UU No 62 tahun 1948*

### Koleksi Foto IPPHOS ANRI

Foto IPPHOS 0042

Foto IPPHOS 0052

Foto IPPHOS 0059

Foto IPPHOS 00197

Foto IPPHOS 0307

Foto IPPHOS 0387

Foto IPPHOS 0490

Foto IPPHOS 0750

Foto IPPHOS 1016

Foto IPPHOS 1040

Foto IPPHOS 1056

Foto IPPHOS 1059

Foto IPPHOS 1071

Foto IPPHOS 1194

Foto IPPHOS 1250

Foto IPPHOS 1344

Foto IPPHOS 1445

Foto IPPHOS 1446

Foto IPPHOS 1520

Foto IPPHOS 1617

### Koran

Surat Kabar *Tanah Air*, 29 Desember 1949

Surat Kabar *Berita Indonesia*, 4 Januari 1946

Surat Kabar *Sinpo*, 17 Desember 1949

Suarat Kabar *Sinpo*, 24 Desember 1949

### Buku dan Artikel

A.H Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 11: Periode KMB*  
Bandung: Angkasa, 1979. ,

\_\_\_\_\_, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia II: Diplomasi Atau Bertempur*. Bandung: Angkasa, 1979

\_\_\_\_\_, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VII, Periode Renville*.  
Bandung: Angkasa, 1979

\_\_\_\_\_, Nasution, *Sekitar Perang kemerdekaan Indonesia I: Proklamasi*.  
Bandung: Angkasa, 1979

Adam Malik; *Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945*. Jakarta: Wijaya, 1962

Adams, Cindy., *Biografi Bung Karno*. Jakarta: Media Presindo, 2014

Benny. G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: TransMedia, 2008

Carey, Peter., *Gelora Api Revolusi*. Jakarta, PT Gramedia, 1986



- Cribb, Robert., *Para Jago Dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949*. Jakarta: Masub Jakarta, 2002
- \_\_\_\_\_, *GangsterAnd Revolutionaries* Honolulu: Universitu of Hawaii Press, 1991
- \_\_\_\_\_, *Gejolak Revolusi Di Jakarta 1945- 1949*. Jakarta: Grafiti, 1990
- Dharmono Hardjoeidjono, *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta jilid II*. Yogyakarta: Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1985
- Djenai Sidik Suraputra, *Revolusi Indonesia Dan Hukum Internasional*. Jakarta: UI Pres, 1991
- Suhartono W. Pranoto, *Revolusi Agustus: Nasionalisme terpasung dan Diplomasi Internasional*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001
- SuhartonoW.Pranoto, *Yogyakarta Ibukota Republik*. Yogyakarta: Kanisius, 2002
- Sudomo Sunaryo & Haryadi Baskoro, *Wasiat HB IX Yogyakarta kota*. Yogyakarta: Galang Pres, 2011
- R. Sukandar, *Memoar Perjuangan Menegakan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945*. Yogyakarta: Yayasan Wiratama 45, 1949
- Sri Margana, *Gelora Di Tanah Raja: Yogyakarta pada masa Revolusi 1945-1949*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017
- Slamet Muljana, *Kesadaran Nasiona Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: LKIS, 2008
- Pramodya Ananta Toer, *Kronik Revolusi Indonesia jilid I 1945*. Jakarta: Kompas Penerbit Gramedia, 2002
- \_\_\_\_\_, *Kronik Revolusi Indonesia jilid II 1946*. Jakarta: Kompas Penerbit Gramedia, 2002
- \_\_\_\_\_, *Kronik Revolusi Indonesia jilid V 1949*. Jakarta: Kompas Populer Gramedia, 2014
- R. Sukandar, *Memoar Perjuangan Menegakan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945* Yogyakarta: Yayasan Wiratama 45 Yogyakarta, 1985
- F.X Sunarto, *Yogya Benteng Proklamasi*, Yogyakarta: Badan Musyawarah Musea, 1985
- Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2008
- P.K Ojong, *Perang Pasifik* Jakarta: Kompas, 2004
- Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: LKIS, 2008
- Taufik Abdullah, *Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid VI: Perang dan Revolusi* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012
- Poeze Harry, *Orang Indonesia di Negeri Belanda*. Jakarta: KPG, 2008



Lampiran



Lampiran 1

Harian SINPO 17 Desember 1949









